



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 54 September 2025

Seputar Kita

Menteri Pertanian:
Hilirisasi Pertanian akan
Menggerakkan Sektor
Lainnya

Profil Pejabat

Marsekal Muda TNI Ir. Bob Henry
Panggabean, M.I.P.: "Selain kejujuran
dan profesionalisme, konsistensi adalah
prinsip hidup saya..."

Opini

Solusi 2 Negara: Meredakan
Ketegangan Kawasan Timteng
dan Peran Indonesia



Versi Digital

SEKOLAH RAKYAT:

PERKUAT KETAHANAN NASIONAL
MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Permohonan Informasi Semakin Mudah

Kontak PPID Lemhannas RI



Biro Humas Settama Lemhannas RI

Gedung Asta Gatra Lantai 2
Jalan Medan Merdeka Selatan
No. 10 Jakarta, 10110



021-383 **2108/2463**
Fax (021) 3832108, 3832109



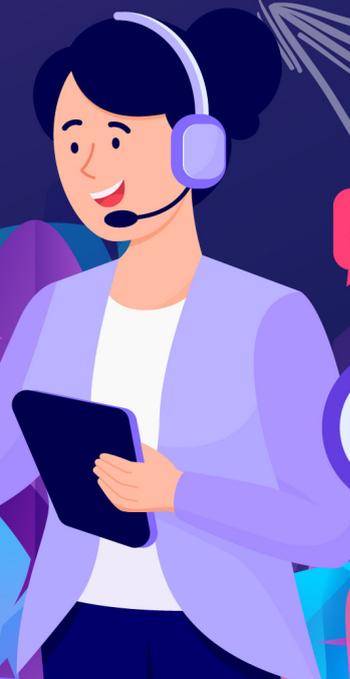
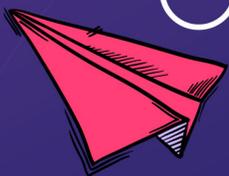
0881 0820 51965



ppid.lemhannas.go.id



Senin - Jumat
08.00 - 15.00 WIB





PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PEMBINA EDWIN

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

MUHAMMAD ARIF NUR

REDAKTUR HENDRA SETIAWAN

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,

CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA

SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,

NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR

LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI

DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 54, September 2025, telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan melalui beragam rubrik. Diharapkan sajian informasi dalam Majalah Swantara dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk rubrik Laporan Utama pada edisi kali ini, dibahas mengenai Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup, berkontribusi lebih besar dalam kehidupan sosial, dan turut mewujudkan visi Indonesia Emas 2025.

Pada rubrik Seputar Kita, redaksi menyajikan informasi terkait ide, gagasan, dan kegiatan yang dilaksanakan Lemhannas RI. Sementara itu, rubrik Profil mengangkat sosok pejabat Lemhannas RI yang baru dilantik serta pegawai teladan, sehingga pembaca dapat mengenal lebih dekat dan menjadikannya inspirasi. Selain itu, tim redaksi juga menghadirkan rubrik lain seperti Opini, Hot News, dan Ragam, yang dapat menjadi referensi tambahan dalam memperkaya pengetahuan pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi keberlangsungan serta peningkatan kualitas karya jurnalistik pada edisi-edisi berikutnya.

Akhirnya, tim redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam terbitnya Majalah Swantara Edisi 54, September 2025. Semoga Majalah Swantara dapat memberikan banyak manfaat dan berkesan di hati para pembaca.

Terima Kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namo Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Sekolah Rakyat: Perkuat Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

SEPUTAR KITA



- 10 Lemhannas RI Hadirkan Menteri PANRB Untuk Cetak Pemimpin-Pemimpin Penggerak Perubahan
- 12 Menko Kumham Imipias RI Beri Kuliah Umum Kepada Peserta P4N 68 dan P3N 25 Lemhannas RI
- 14 Lemhannas RI Jalin Kolaborasi Pengukuran Ketahanan Nasional Bersama TNI AD
- 16 Menteri Pertanian: Hilirisasi Pertanian Akan Menggerakkan Sektor Lainnya
- 18 Sestama Lemhannas RI Berikan Pengenalan Lembaga kepada Pasangan Peserta P4N 68
- 20 Gubernur Lemhannas RI Menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
- 21 Hilirisasi *Rare Earth Element* sebagai Pilar Industrialisasi
- 22 Kepala BNN RI: Narkoba Harus Dilihat Sebagai Isu Ketahanan Nasional
- 24 Lemhannas RI Tutup Pendidikan P4N 68: Cetak Kader Pemimpin Nasional

SEPUTAR KITA



- 26 Gubernur Lemhannas RI Sampaikan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Kegiatan PKKMB Universitas Trisakti
- 28 Lemhannas RI Bahas RKA T.A. 2026 Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI



- 30 Gubernur Lemhannas RI Terima Audiensi BPKH Bahas Penguatan Ekosistem Haji dan Umrah
- 32 Lemhannas RI dan BPS RI Perkuat Sinergi Data untuk Ketahanan Nasional

- 34 Lemhannas Goes To Campus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- 36 Gubernur Lemhannas RI: Mahasiswa Harus Jadi Agen Perubahan Berkarakter Pancasila

OPINI



- 38 Solusi 2 Negara: Meredakan Ketegangan Kawasan Timteng dan Peran Indonesia

PROFIL PEJABAT

41



Marsekal Muda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.:
"Selain kejujuran dan profesionalisme, konsistensi adalah prinsip hidup saya..."

PROFIL PEGAWAI

44



Fedora Esperanza dan Perjalanan Hidup yang Tidak Terduga

HOT NEWS



- 46 Pidato Perdana Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB
- 47 UU Tapera Dibatalkan secara Keseluruhan

RAGAM



- 48 Morchella Rinjaniensis: Morel Baru dari Rinjani
- 49 Spesies Baru Tanpa Mata: "Barbodes klapanunggalensis"

SUARA PESERTA



- 50 Brigjen TNI Dwi Sasongko, Pati TNI AD Peraih KKP Terbaik Lemhannas RI: Mengangkat Isu Perubahan Iklim sebagai Pilar Ketahanan Nasional
- 51 Irjen. Pol. Mukti Juharsa, S.I.K., M.H.: Mengabdikan untuk Bangsa, Meraih Prestasi Akademik Terbaik di Lemhannas RI



52 GALLERY

SEKOLAH RAKYAT:

PERKUAT KETAHANAN NASIONAL
MENUJU INDONESIA EMAS 2045



Di berbagai pelosok negeri, pendidikan masih menjadi sebuah kemewahan. Tidak sedikit anak dari keluarga miskin terpaksa berhenti sekolah karena orang tua tidak mampu menjangkau mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipungkiri selalu menempati posisi sentral dalam pembangunan bangsa. Tidak hanya sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun daya tahan sebuah negara. Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2025, harus memastikan seluruh anak bangsa memiliki akses pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.

Presiden Prabowo Subianto, sejak awal masa pemerintahannya, menyatakan bahwa rantai kemiskinan hanya bisa diputus melalui intervensi menyeluruh di bidang pendidikan. Dari gagasan itu lahir program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup, berkontribusi lebih besar dalam kehidupan sosial, dan turut mewujudkan visi Indonesia Emas 2025

Sekolah Rakyat dirancang sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Inpres ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor utama pembangunan manusia, dan negara memiliki kewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan peran serta masyarakat.

Dalam Inpres tersebut juga telah ditetapkan peran dan tanggung jawab lintas kementerian untuk mengawaki program Sekolah Rakyat, yaitu



Kementerian Sosial, Kementerian PANRB, Kemendikbud Ristek, dan Kementerian Agama. Program Sekolah Rakyat juga merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden, khususnya misi keempat yang menekankan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia salah satunya melalui pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat ada 3,9 juta anak yang tak bersekolah saat ini. Rinciannya sebanyak 881.168 anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus tapi tidak melanjutkan sekolah, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah. Menurut catatan Kemendikdasmen, faktor penyebab anak tidak sekolah adalah tidak adanya biaya yang mencakup hingga 25,55 persen. Di sinilah Sekolah Rakyat mengambil peran untuk memberikan akses pendidikan gratis sekaligus memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dari keluarga miskin.

Konsep Sekolah Rakyat

Berbeda dari sekolah reguler, Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama atau boarding school. Setiap anak nantinya akan mendapatkan akses pengukuran gizi, layanan kesehatan, pengukuran tingkat IQ, kedisiplinan dan kecerdasan mental hingga pengukuran kompetensi murid secara gratis yang akan dilakukan oleh Kemensos bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten dalam masing-masing bidang

pengukuran. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada orang tua dan wali murid setiap semester. Dengan ini diharapkan orang tua tidak lagi terbebani biaya, dan anak bisa fokus belajar tanpa memikirkan mahalnya biaya pendidikan.

Seleksi siswa pada Sekolah Rakyat juga tidak didasarkan hanya pada tes akademik. Siswa yang mendaftar diseleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan prioritas. Anak-anak dari keluarga yang masuk desil 1 (10 persen termiskin) yang tinggal di sekitar Sekolah Rakyat dan desil 2 (11-20 persen terendah) otomatis diprioritaskan. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses tes psikotes hingga tes kesehatan. Mekanisme ini diharapkan mencegah salah sasaran dalam seleksi murid Sekolah Rakyat.

Program ini juga tidak hanya fokus pada pendidikan akademik yang mengacu pada kurikulum standar pendidikan nasional, namun juga fokus pada pendidikan karakter yang dirancang dalam kurikulum yang holistik yang menekankan pada pendidikan kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat melahirkan generasi dengan keterampilan hidup, karakter kuat dan jiwa nasionalis.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat dapat dikatakan berjalan cepat.

● LAPORAN UTAMA



Foto. BPMI Setpres

Pada 14 Juli 2025, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Beberapa minggu kemudian, tambahan 37 titik menyusul. Dengan demikian, total terdapat 100 sekolah rintisan berhasil dijalankan. Capaian ini cukup cepat mengingat skala dan kompleksitas program.

Hingga akhir September 2025, Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Margaguna, Jakarta Selatan, pada awal September lalu menargetkan jumlah Sekolah Rakyat bertambah menjadi 165 sekolah dengan kapasitas 15.895 siswa. "Hari ini saya meninjau salah satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 100 sekolah yang beroperasi. Saya mendapat laporan, akhir September nanti jumlahnya akan bertambah menjadi 165 Sekolah Rakyat," ungkap Presiden.

Presiden Prabowo sendiri juga mengapresiasi capaian ini. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai "prestasi luar biasa" yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Tak hanya pemerintah pusat, banyak kepala daerah juga menyambut positif.

Untuk menunjang operasional, disiapkan pula 2.296 guru dan 155 kepala sekolah. Pada pembekalan Kepala Sekolah dan Guru pada Agustus 2025 lalu, Presiden

Prabowo berpesan agar para guru dan kepala sekolah dapat membina dan mendidik siswa dengan baik. "Seluruh rakyat Indonesia harus menikmati kekayaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan itu tugas para guru. Bina anak didikmu, didik mereka dengan baik, beri harapan kepada mereka, bantu mereka, buat mereka gembira, jangan buat mereka pesimis," tegasnya.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa para guru dan kepala Sekolah Rakyat memiliki tugas yang mulia dalam menyiapkan masa depan bangsa. "Anda sedang dalam rangka memutus rantai kemiskinan di seluruh dunia, mereka ini anak-anak yang dididik, nanti mereka akan kembali ke orang tua mereka, dan merekalah yang akan mengangkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan," ujarnya.

Seratus titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada Juli 2025 ini diperuntukkan bagi belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak dengan 48 lokasi, Sumatera 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku masing-masing 4 lokasi, serta Papua 3 lokasi. Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.

Tantangan Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Meski dinilai cepat, pelaksanaan Sekolah Rakyat menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tantangan pertama yaitu faktor penyiapan tenaga pengajar pada Sekolah Rakyat. Sejak seleksi tahap pertama, berdasarkan data Kementerian Sosial, terdapat sejumlah 143 guru mengundurkan diri.

Salah satu faktor utama pengunduran diri tersebut adalah karena lokasi penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal yang sulit dijangkau dengan transportasi umum sehingga membutuhkan tambahan waktu dan biaya yang cukup besar. Kondisi geografis yang beragam juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para guru sekolah rakyat dalam menjalani tugas yang telah diberikan.

Kehadiran guru-guru berkualitas sangat vital untuk mewujudkan tujuan pemerataan pendidikan di Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial bergerak cepat mengatasi kendala ini dengan mengisi posisi kosong tersebut dengan tenaga cadangan yang akan dilantik di tahap berikutnya. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penempatan agar dapat meminimalkan faktor yang menyebabkan guru mengundurkan diri khususnya terkait dengan akses dan jarak lokasi penugasan.

Tantangan lain yang menjadi kendala adalah setiap sekolah diperkirakan memerlukan anggaran pembangunan dan yang tidak kecil, terutama jika ada fasilitas asrama, kebutuhan infrastruktur lengkap, dan dukungan operasional. Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran lancar dan tepat sasaran di tengah upaya efisiensi yang saat ini sedang dilakukan oleh negara sehingga pelaksanaan Sekolah Rakyat yang telah berjalan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Perkuat Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis bangsa yang memuat daya tangkal serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup dimensi yang lebih luas yang disebut dengan Astagatra yang terdiri dari gatra yang bersifat statis yaitu Trigatra (geografi, demografi, sumber daya alam) serta gatra yang bersifat dinamis yaitu Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan). Pendidikan, dalam hal ini, memainkan peran sentral karena kualitas manusia adalah inti dari seluruh aspek ketahanan nasional.

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar sebagai kebijakan pendidikan,

melainkan juga sebagai strategi memperkuat ketahanan nasional. Pertama, dari perspektif demografi, Indonesia diperkirakan tengah berada di puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Sekolah Rakyat diharapkan dapat memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak tertinggal, sehingga potensi bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan bangsa.

Kedua, dari perspektif gatra ekonomi, Sekolah Rakyat berperan memutus rantai kemiskinan. Dengan membebaskan keluarga miskin dari beban biaya pendidikan, program ini meningkatkan peluang mobilitas sosial. Lulusan Sekolah Rakyat yang masuk usia produktif pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ketiga, dari gatra sosial budaya, Sekolah Rakyat menyatukan anak-anak untuk belajar hidup bersama, menumbuhkan toleransi, dan memahami kebhinekaan. Dalam konteks meningkatnya ancaman intoleransi, sekolah ini diharapkan dapat menjadi laboratorium persatuan bangsa.

Dari perspektif gatra ideologi dan politik, kurikulum Sekolah Rakyat yang juga menekankan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan Pancasila. Diharapkan, Sekolah Rakyat nantinya dapat menghasilkan generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran ideologis.

Sekolah Rakyat juga diharapkan melahirkan generasi yang disiplin, sehat, dan berkarakter agar dapat menjadi warga negara yang siap menjaga kedaulatan negara dalam perannya di berbagai sektor.

Sekolah Rakyat sejatinya tidak hanya menjadi proyek pendidikan jangka pendek namun sebuah program yang menyentuh akar persoalan bangsa yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan mengintegrasikan pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan karakter, program ini membuka jalan bagi generasi baru Indonesia yang lebih tangguh.

Program ini harus dilaksanakan dengan koordinasi berkesinambungan lintas pemerintahan dan dievaluasi secara berkala. Jika dikelola konsisten, Sekolah Rakyat bisa menjadi pilar penting dalam mendidik generasi muda sebagai strategi Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa baru Universitas Trisakti, “Jembatan menuju Indonesia Emas 2045 tergantung adik-adik sekalian (mahasiswa sebagai generasi muda), Jika SDM kita unggul, kita bisa mencapainya,” jelas Gubernur Lemhannas RI.



Foto. Indonesia.go.id

Lemhannas RI Hadirkan Menteri PANRB Untuk

Cetak Pemimpin- Pemimpin Penggerak Perubahan

"KemenPANRB selalu mendorong untuk melakukan kolaborasi terhadap semua kebijakan, karena inti dari reformasi birokrasi adalah bagaimana kita saling berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan,"

Rini Widyantini - Menteri PANRB



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rini Widyantini, S.H., MPM., memberikan kuliah umum bagi peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-68 dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan ke-25 Lemhannas RI di Auditorium Gadjah Mada, Selasa (1/7). Kehadiran Rini Widyantini disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa kedatangan Menteri PANRB sangat penting. Menurutnya, isu pemantapan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang efektif sekaligus memperkuat ketahanan nasional. "Kami di Lemhannas mengintegrasikan semua kekuatan nasional dalam pendidikan, dan salah satu kekuatan yang signifikan bagi kemajuan bangsa adalah birokrasi," tegasnya.

Dalam kuliah umum bertema "Reformasi Birokrasi Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat", Rini Widyantini menyampaikan arahan Presiden dan Wakil Presiden

terkait RB, yakni responsivitas birokrasi, percepatan implementasi kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, efektivitas alokasi anggaran, pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, pengelolaan ASN, pelayanan berbasis teknologi, serta reformasi pelayanan publik.

Rini menjelaskan, KemenPANRB kini ditempatkan langsung di bawah koordinasi Presiden dengan peran strategis sebagai Chief Operating Officer (COO) dalam struktur pemerintahan yang bertugas menjaga tata kelola pemerintahan dari tingkat kementerian/ lembaga hingga pemerintah daerah. "RB merupakan transformasi menyeluruh agar sistem pemerintahan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu melayani masyarakat sekaligus mencapai target pembangunan nasional," jelasnya.

Guna mendukung visi misi Presiden, RB yang berdampak untuk kesejahteraan rakyat telah dituangkan dalam berbagai regulasi, antara lain: (1) RB pengentasan kemiskinan (Inpres Nomor 8 Tahun 2025); (2) RB peningkatan investasi (Inpres Nomor 7 Tahun 2019); (3) RB mendorong hilirisasi (Keppres Nomor 1 Tahun 2025); (4) RB mendukung ketahanan pangan nasional (Inpres

Nomor 3 Tahun 2025); serta (5) RB peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan (Inpres Nomor 5 Tahun 2025).

Lebih lanjut, Rini menyoroti tantangan birokrasi ke depan, yakni membangun kultur baru, meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi kesenjangan kompetensi digital, membangun kebijakan berbasis data, bukti, dan empati, serta menghapus sekat-sekat birokrasi. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki pola pikir transformasional, yakni adaptif terhadap perubahan, berpikir sistemik, serta berorientasi pada dampak, bukan rutinitas.

Mengakhiri paparannya, Rini berpesan agar peserta pendidikan Lemhannas RI berperan sebagai agen perubahan dalam implementasi RB. Hal itu diwujudkan melalui upaya memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi, melahirkan inovasi baru untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) dalam program prioritas Presiden, serta meneladani budaya kerja aktif dan kolaboratif dalam menyelesaikan isu strategis. "Birokrasi yang lincah adalah birokrasi yang mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan tanpa kehilangan integritas dan kualitas pelayanan," pungkasnya.



Menko Kumham Imipas RI Beri Kuliah Umum Kepada Peserta P4N 68 dan P3N 25 Lemhannas RI

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., memberikan kuliah umum bagi peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-68 dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N)

Angkatan ke-25 Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, Kamis (3/7). Kedatangan Yusril Ihza disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa proses hukum merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. "Tanpa hukum

yang tegak, ketahanan nasional kita tidak akan pernah mengalami kemajuan dan kekuatan," ujarnya. Sejalan dengan hal itu, hukum menjadi materi wajib dalam pendidikan Lemhannas RI sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam sistem pemerintahan nasional.



"Merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir di forum ini. Lemhannas bukan hanya kawah candradimuka kader kepemimpinan nasional, tetapi juga tempat penting untuk memperkuat cara pandang kebangsaan dan visi strategis lintas sektor," kata Yusril Ihza dalam paparannya. Ia menegaskan bahwa salah satu mandat penting Kemenko Kumham Imipas RI adalah menegakkan hukum yang adil, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat sistem peradilan nasional. Amanah tersebut diwujudkan melalui arah pembangunan hukum yang humanis, responsif, dan inklusif.

Kemenko Kumham Imipas RI yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 142 Tahun 2024 memiliki posisi strategis dalam memperkuat governance di bidang hukum dan HAM, sekaligus mempercepat reformasi sistem keimigrasian dan pemyarakatan. Lembaga ini memiliki

tiga fungsi utama, yakni: (1) koordinasi perumusan dan sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga teknis; (2) pengendalian pelaksanaan program prioritas nasional lintas sektor; serta (3) fasilitasi penyelesaian isu strategis dan konflik peran antarinstansi. Dalam peran tersebut, Kemenko Kumham Imipas RI bertindak sebagai pengarah strategis (strategic steering), penjaga konsistensi kebijakan (policy guardian), dan penghubung antar pemangku kepentingan (policy integrator).

Dalam kuliah umum ini, Yusril Ihza juga memaparkan sejumlah isu strategis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pertama, fragmentasi hukum dan over-regulation, yakni tumpang tindih regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan *legislative review* terpadu. Kedua, pelanggaran HAM

berat dan ketidakpuasan publik, yang menuntut penyelesaian kasus masa lalu berbasis prinsip keadilan transisional serta keseimbangan antara keadilan dan rekonsiliasi.

Ketiga, reformasi keimigrasian dan mobilitas global, seperti transformasi digital yang belum sepenuhnya mendukung efisiensi dan keamanan, serta isu pengawasan orang asing, WNA ilegal, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Keempat, krisis overcrowding dan revitalisasi pemyarakatan, di mana tingkat hunian lapas mencapai lebih dari 200% kapasitas normal sehingga diperlukan pendekatan koordinatif melalui sistem pemidanaan alternatif dan restorative justice.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Yusril Ihza dan peserta P4N serta P3N.



Lemhannas RI Jalin Kolaborasi Pengukuran Ketahanan Nasional Bersama TNI AD



Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menandatangani nota kesepahaman antara Lemhannas RI dan TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Jumat (11/7).

Penandatanganan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dalam penyempurnaan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional yang telah lama menjadi pembahasan kedua instansi. Selain itu, nota kesepahaman ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengkajian, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi kepada Jenderal Maruli Simanjuntak beserta jajaran atas terjalannya kerja sama strategis ini. Ia menekankan pentingnya dukungan

TNI AD dalam pengumpulan data untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, hingga mendeteksi gangguan yang berpotensi mengancam ketahanan nasional, sehingga dapat dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kami sangat berbahagia karena keinginan kami untuk menjadikan Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas mendapat dukungan dari Bapak Kasad. Hal ini akan semakin membantu kita dalam menghasilkan data yang akurat dan terkini," ujar Gubernur Lemhannas RI. Menyoroti situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian dan persaingan yang semakin ketat, ia menekankan bahwa kekuatan militer harus ditopang oleh data yang kuat agar mampu mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan Indonesia. Gubernur Lemhannas RI optimistis nota kesepahaman ini akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan NKRI.

Sementara itu, Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Lemhannas RI kepada TNI AD untuk mendukung pengumpulan data Indeks Ketahanan Nasional. "Dengan adanya kerja sama ini, TNI AD siap dan sigap mengkaji hal-hal demi kebaikan negara dan bangsa. Saya harap pelaksanaannya bisa segera dimulai agar program Presiden dapat segera dieksekusi," pungkas Kasad.

Acara penandatanganan turut dihadiri Koordinator Staf Ahli Kasad Letjen TNI Zamroni, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasad Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, Asisten Intelijen Kasad Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, Asisten Operasi Kasad Mayjen TNI Christian Kurniantoro, serta jajaran pejabat terkait lainnya.



Menteri Pertanian: Hilirisasi Pertanian Akan Menggerakkan Sektor Lainnya

Ketahanan pangan identik dengan ketahanan nasional. Pangan bermasalah, negara bermasalah," kata Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. Hal tersebut disampaikan dalam Kuliah Umum Menteri Pertanian RI kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan



MENTERI PERTANIAN

Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII Lemhannas RI pada Kamis (24/7).

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dalam kata pengantarnya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Menteri Pertanian RI memberikan pencerahan kepada peserta pendidikan Lemhannas RI. Menurutnya, materi tersebut sangat penting karena ketahanan pangan merupakan salah satu isu pokok dalam proses pendidikan.

“Sebagai pimpinan nasional, kita harus menyadari prioritas bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa besar, dan kebutuhan paling pokok adalah ketahanan pangan. Kita harus bisa memastikan kebutuhan pangan kita cukup,” ucap Gubernur Lemhannas RI. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa materi yang disampaikan Menteri Pertanian RI menjadi bekal penting bagi para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian RI menyampaikan materi berjudul Membangun Sistem Hilirisasi Pertanian yang Berdaya Saing untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Ia memaparkan data FAO tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sebanyak 58 negara mengalami kelaparan serius, sementara 725 juta penduduk dunia mengalami kekurangan gizi. Di dalam negeri, data Kemendagri dan Kemenkes tahun 2023 mencatat 7–16% penduduk Indonesia rentan kelaparan dan 21,5% mengalami stunting.

Menyoroti data tersebut, Menteri Pertanian RI menekankan bahwa kebijakan yang diambil para pimpinan nasional akan sangat berdampak. “Bapak dan Ibu peserta sudah menjadi pengambil kebijakan. Hati-hati dalam mengambil kebijakan. Meleset sedikit, dampaknya terhadap jutaan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk menyukseskan swasembada pangan dibutuhkan kebijakan yang tepat serta regulasi yang tegas dan jelas. Salah satunya terkait irigasi, yang harus diatur mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. “Jika revitalisasi irigasi dilakukan di tingkat kabupaten, maka secara berjenjang hingga tingkat pusat juga harus dilakukan agar berhasil maksimal,” tegasnya.

Dalam ceramahnya, Menteri Pertanian RI juga menyampaikan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci menuju Indonesia Emas. “Kalau kita bergerak di hulu pertanian, itu akan menggerakkan sektor lainnya,” ucapnya. Namun, ia menegaskan bahwa hilirisasi tersebut harus dilakukan secara konsisten.



Sestama Lemhannas RI Berikan Pengenalan Lembaga kepada Pendamping Peserta P4N 68

"Tugas peserta bukan sekadar lulus dari Lemhannas RI, tetapi terus memupuk pohon ketahanan nasional agar bisa tumbuh berkembang mewujudkan tujuan nasional."

Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S. M.Si.

Hal tersebut disampaikan saat Sestama Lemhannas RI memberikan pengenalan lembaga kepada peserta Penataran Istri/Suami Peserta P4N Angkatan LXVIII Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada.

Lebih lanjut, Sestama Lemhannas RI menyampaikan bahwa Lemhannas RI didirikan pada 20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno berawal dari perkembangan eskalasi geopolitik. Pengetahuan geopolitik merupakan ilmu yang sangat kompleks, sehingga Lemhannas didirikan sebagai school of geopolitics. "Dunia yang besar ini dengan berbagai negara dan bangsa akan saling memengaruhi dengan latar belakang masing-masing," ujarnya.

Sejalan dengan itu, bangsa Indonesia harus mampu menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sebagai bagian dari dinamika geopolitik untuk mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, pendirian Lemhannas RI bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh unsur kekuatan, baik sipil maupun militer. Dengan demikian, Lemhannas RI mengemban tugas dalam pelaksanaan pendidikan, pengkajian strategis, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan pengukuran ketahanan nasional.

Sestama Lemhannas RI kemudian mengibaratkan konsep ketahanan nasional seperti sebuah pohon. Jika akarnya kuat, maka pohon tersebut akan tumbuh menjulang tinggi. Akar dalam paradigma ketahanan nasional adalah empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, penanaman nilai kebangsaan menjadi sangat penting.

Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa peserta pendidikan Lemhannas RI adalah kader pimpinan nasional. Oleh karena itu, pasangan peserta pendidikan juga diberikan pembekalan. Pasangan harus memahami bahwa sebagai kader pimpinan nasional, peserta pendidikan akan mengemban tanggung jawab besar.

"Bangsa ini ada di tangan mereka. Kalau mereka goyah dan tidak punya karakter, maka bangsa ini tidak akan mencapai tujuannya," ujar Sestama Lemhannas RI. Ia juga menegaskan bahwa alumni Lemhannas RI harus menjadi pemimpin yang berkarakter negarawan, berpikir integral, holistik, dan komprehensif. Status sebagai alumni Lemhannas bukan sekadar ajang adu gagah, melainkan amanah dengan tanggung jawab besar.

"Salah satu indikator lembaga ini adalah para kader lulusannya, yakni orang-orang dengan kompetensi sebagai pemimpin negarawan yang berkarakter dan berintegritas," imbuhnya.

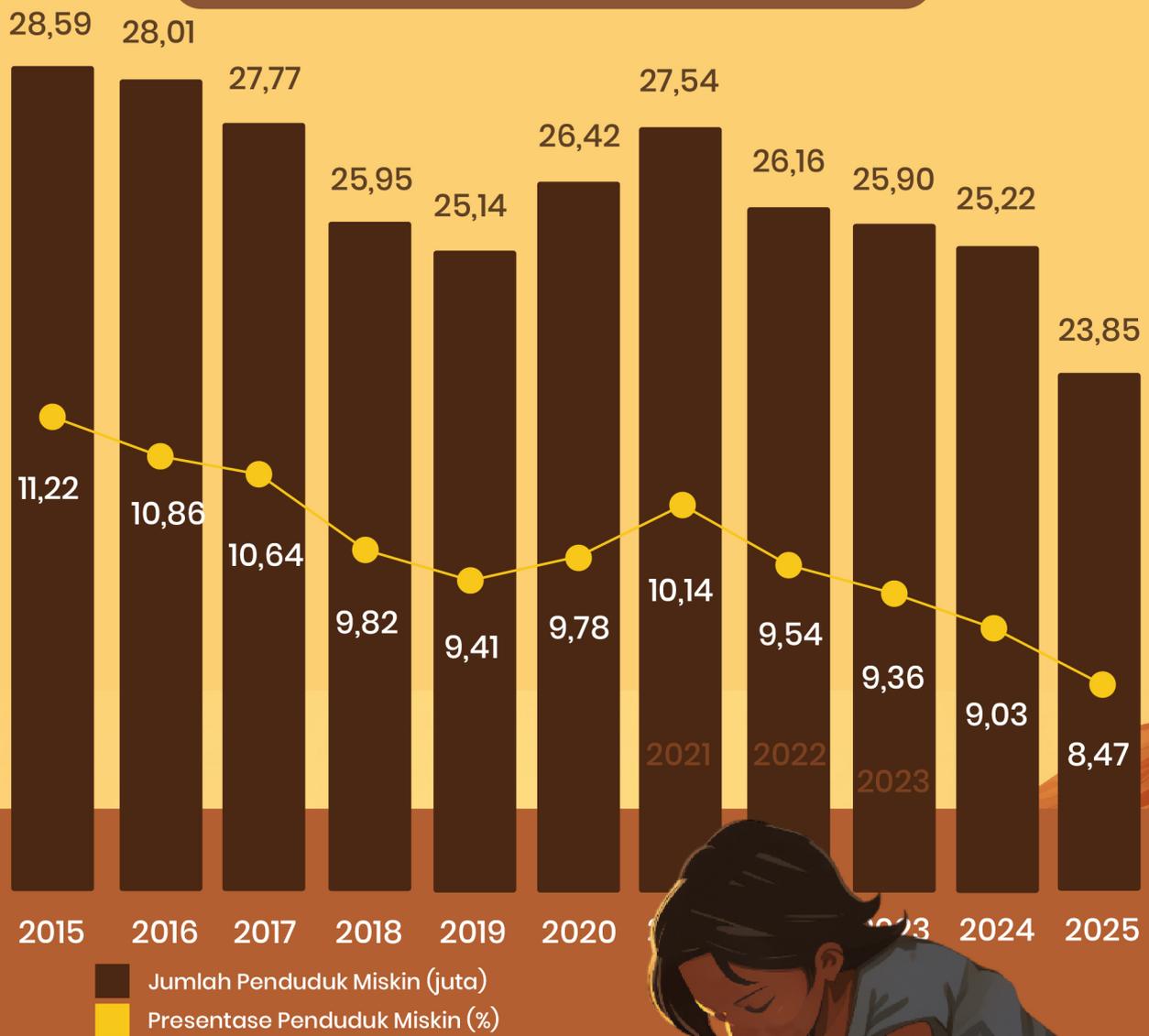
Mengutip Amit Kalantri, "Pasanganku adalah perisaiku, pasanganku adalah kekuatanku," Sestama Lemhannas RI berpesan kepada para pasangan peserta pendidikan untuk mendukung peserta agar menjadi pemimpin nasional yang amanah dan mampu membawa bangsa semakin maju. Sebagai penutup, Sestama Lemhannas RI berpesan, "Semua harus dikolaborasi, diintegrasikan dalam satu tujuan, yaitu bagaimana kita mencapai tujuan nasional berbangsa dan bertanah air," pungkasnya.



Tren Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia

.Dalam 5 tahun terakhir, angka jumlah penduduk terus mengalami penurunan, tahun 2025, angka penduduk miskin semakin menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan yakni 23,85 Juta Penduduk dari semula sejumlah 25,22 juta penduduk pada tahun 2024.

Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun ke Tahun



Keterangan:
- Tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan tinggi karena Pandemi Covid-19
- Pada Maret 2015 dan September 2022 peningkatan jumlah penduduk miskin diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

Gubernur Lemhannas RI Menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

“Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan,” Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, pada Jumat (15/8).

Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa di tengah kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat untuk menjaga rakyat. Sejalan dengan itu, Ketua DPR

RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, juga menyoroti berbagai tantangan global seperti ketegangan dan konflik geopolitik, perang dagang, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, serta pergeseran kekuatan global.

Indonesia yang berada dalam pusaran global harus memiliki fondasi yang kuat agar dapat berdiri tegak di tengah eskalasi geopolitik dunia tanpa kehilangan jati diri bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua MPR RI dalam pidatonya menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab MPR RI sebagai representasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga arah dan moral kebangsaan.

Presiden RI pun mendukung penuh sosialisasi empat konsensus dasar bangsa

tersebut. “Ini sangat penting, karena pemahaman UUD 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita,” tegas Presiden RI.

Lemhannas RI, melalui Kedeputusan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, secara konsisten mendukung sosialisasi empat konsensus dasar bangsa kepada berbagai pihak melalui kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pelatihan untuk pelatih, dan gebyar kebangsaan.

Mengakhiri pidatonya, Presiden RI menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga nasional yang telah berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai dengan peran dan kewenangannya. “Kita harus bersatu dan bergotong royong. Kita harus wujudkan Indonesia incorporated,” pungkas Presiden RI.





Hilirisasi *Rare Earth Element* Sebagai Pilar Industrialisasi

Dwi Handayani, S.E., M.M., peserta Program Penyiapan dan Pematapan Pemimpin Nasional (P4N) Angkatan LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, berhasil menyusun Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Hilirisasi Rare Earth Element (REE) Sebagai Pilar Industrialisasi Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” Melalui karya ilmiah tersebut, ia menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi Rare Earth Elements (REE) merupakan salah satu strategi kunci untuk memperkuat kemandirian industri nasional.

Dalam kajiannya, Dwi Handayani mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan REE yang melimpah, terutama dari mineral ikutan seperti monasit dan xenotim yang tersebar di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua. Potensi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 miliar ton. Namun hingga kini, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Aktivitas pengolahan REE masih didominasi oleh lembaga riset seperti BATAN, Tekmira ESDM, UNPAD, dan BPPT, dengan hasil berupa REE hidroksida skala industri komersial, belum mencapai tahap pemurnian menjadi oksida individual yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan oleh industri pengguna akhir seperti baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga perangkat elektronik.

Dwi Handayani menyoroti bahwa secara global, Tiongkok masih menguasai lebih dari 85 persen kapasitas pemurnian REE dunia, sementara negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Uni Eropa mulai mengembangkan strategi hilirisasi mereka untuk mengurangi ketergantungan. Dalam konteks tersebut,

Indonesia dengan potensi sumber daya dan posisi geostrategisnya di kawasan Indo-Pasifik, disebut Dwi Handayani berada pada momentum krusial untuk mengambil peran lebih besar, namun masih menghadapi tantangan mendasar. Belum adanya data pembaruan resmi dari roadmap hilirisasi industri REE Kementerian Perindustrian sejak 2021 juga menunjukkan stagnasi arah kebijakan terkini.

Lebih lanjut, Dwi Handayani menggarisbawahi bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan teknologi pemurnian dan ekstraksi yang masih kompleks, mahal, dan belum tersedia dalam skala industri besar. Proses pemisahan unsur REE membutuhkan proses kimia khusus yang saat ini masih didominasi oleh negara seperti Tiongkok dan Jepang.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan limbah radioaktif, logistik mineral strategis, hingga ketersediaan tenaga kerja terampil masih sangat terbatas. Kurikulum pendidikan vokasi nasional belum sepenuhnya menyiapkan sumber daya manusia yang khusus untuk industri REE.

Di sisi lain, kelemahan regulasi dan koordinasi kelembagaan juga menjadi hambatan serius. Hingga kini belum ada regulasi khusus atau otoritas nasional REE, sehingga kebijakan antar-kementerian sering kali tumpang tindih dan tidak terintegrasi. Dari sisi Eksternal, Dominasi pasar global oleh Tiongkok menimbulkan ketergantungan teknologi dan fluktuasi harga global yang tinggi, sementara isu lingkungan terkait limbah radioaktif seperti thorium dan uranium memunculkan resistensi dari masyarakat lokal serta pasar ekspor yang kini semakin menuntut standar industri hijau dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dwi merumuskan strategi pengembangan hilirisasi REE melalui pendekatan TWOS (Threat–Weakness–Opportunities–Strength) dengan fokus pada penguatan ekosistem industri terintegrasi. Strategi S–O meliputi pemanfaatan kekuatan sumber daya domestik seperti cadangan REE yang besar, dukungan regulasi, serta kawasan industri hijau untuk mengembangkan kluster hilirisasi REE, memperluas ekspor bernilai tambah tinggi, dan menjalin kerja sama internasional berbasis komitmen ESG. Strategi W–O difokuskan pada pembangunan pusat riset nasional, pelatihan SDM vokasional, dan mobilisasi skema pembiayaan seperti blended finance serta alih teknologi dari negara-negara mitra seperti Jepang dan Jerman. Lebih lanjut, strategi S–T bertujuan menghadapi ancaman eksternal melalui diversifikasi pasar, adopsi teknologi bersih, dan penyusunan standar nasional REE. Sedangkan strategi W–T menitikberatkan pada reformasi regulasi, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan pelibatan komunitas lokal untuk mencegah konflik sosial.

Dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan tiga kluster hilirisasi REE nasional di Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi dengan berbasis potensi lokal mineral REE masing-masing wilayah sangat dibutuhkan. Dwi Handayani menyebutkan bahwa strategi penguatan rantai nilai juga harus dijalankan dari hulu ke hilir, mulai dari pemetaan cadangan berbasis teknologi geospasial, pembangunan refinery dan pabrik magnet permanen serta baterai, hingga pembukaan pasar ekspor strategis dengan sertifikasi Green-REE. Keseluruhan strategi ini, disebut Dwi Handayani harus didukung oleh reformasi regulasi, penguatan SDM, insentif fiskal, serta pelibatan multipihak dalam kerangka quad helix.

Kepala BNN RI:

Narkoba Harus Dilihat Sebagai Isu Ketahanan Nasional



Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV Lemhannas RI di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, pada Selasa (29/7). Pada kesempatan tersebut, Marthinus Hukom menyampaikan materi berjudul “Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba”.

Isu narkoba kini telah ditetapkan ke dalam Astacita nomor tujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Marthinus Hukom menyebut narkoba sebagai paradoks pembangunan nasional. “Saya setuju narkoba tidak lagi dipotret sebagai isu kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), tetapi harus dilihat sebagai isu ketahanan nasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa narkoba tidak lagi bisa dipandang sebatas isu domestik, melainkan juga isu regional dan internasional. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa 90% narkoba yang ditemukan merupakan hasil impor ilegal dari berbagai wilayah.

Marthinus Hukom menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan sia-sia apabila dirusak narkoba. Ancaman narkoba bukan

hanya persoalan kesehatan dan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan bangsa. Lebih lanjut, ia memaparkan tiga moral standing Kepala BNN. Pertama, memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan dan peradaban. Kedua, bertindak represif terhadap jaringan sindikat narkoba dengan memiskinkan mereka. Ketiga, bersikap humanis terhadap penyalahguna narkoba dengan merehabilitasi para pengguna. “Presiden Republik Indonesia telah memberikan payung besar, yaitu Astacita, untuk menegaskan bahwa siapa pun yang bermain dengan narkoba dipastikan bersikap melawan negara,” tegasnya.

Indonesia dinilai sangat rentan menjadi target pemasaran narkoba oleh jaringan internasional yang berjejaring dengan sindikat domestik. Data prevalensi tahun 2023 menunjukkan penyalahguna narkoba sebesar 1,73% atau 3,33 juta jiwa dari penduduk usia 15–64 tahun, mayoritas berasal dari kelompok usia produktif (15–49 tahun). Jumlah pengguna dari kalangan remaja juga mengalami peningkatan, dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,52% pada 2023 atau setara dengan 312 ribu remaja. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ±17.500 pulau dengan garis pantai mencapai 108.000 km, ditambah jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, menjadikan Indonesia pasar yang sangat potensial bagi sindikat narkoba. Kerentanan sosial juga menjadi faktor pendorong, seperti masyarakat

pesisir yang rentan menjadi kurir narkoba karena iming-iming upah tinggi, adanya kawasan rawan bandar narkoba di kota-kota besar, serta pergeseran nilai etika dan moral masyarakat.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, BNN RI menetapkan sejumlah kebijakan dan strategi sebagai pijakan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Kebijakan tersebut meliputi penguatan kolaborasi melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, penguatan intelijen dengan pembangunan big data intelijen untuk mendukung evidence-based policy dan Drugs Signature Analysis, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan melalui ketahanan masyarakat, penguatan kerja sama internasional dengan aparat penegak hukum negara tetangga serta pengawasan pekerja migran, penguatan tematik dan ikonik melalui penanganan permasalahan mendasar di wilayah rawan narkoba, serta penguatan SDM dan infrastruktur melalui peningkatan kualitas dan kuantitas personel serta sarana prasarana BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK).

Pada kesempatan tersebut, Marthinus Hukom didampingi Deputi Rehabilitasi, dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes., serta Plt. Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Kombes Pol. Satria Oktoreza, S.I.K.



Saya setuju narkoba tidak lagi dipotret sebagai isu kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional), tetapi harus dilihat sebagai isu ketahanan nasional.

Komjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.



PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

Lemhannas RI Tutup Pendidikan P4N 68: **Cetak Kader Pemimpin Nasional**



Abdikan apa yang saudara miliki dengan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Seru Gubernur Lemhannas RI, Drs. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dalam upacara penutupan Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (5/8).

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa penutupan P4N 68 merupakan momentum awal pengabdian sebagai kader pemimpin nasional yang diharapkan memiliki karakter negarawan, berintegritas, serta mampu mendukung visi dan misi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Seiring berakhirnya program P4N 68, para peserta resmi menanggalkan statusnya sebagai peserta dan menjadi alumni Lemhannas RI dengan penyematan pin alumni. Ace Hasan menekankan bahwa pin tersebut bukan sekadar simbol, melainkan mengandung tanggung jawab besar. “Pin Lemhannas RI harus dijaga dengan etika dan norma hukum agar integritas sebagai pemimpin nasional tetap terpelihara,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI akan terus memantau kiprah para alumni melalui Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL-Lemhannas). Organisasi ini berperan mengevaluasi penggunaan pin alumni dan memastikan para lulusan memegang teguh akuntabilitas, termasuk bila ada pelanggaran hukum maupun etika.

Selama mengikuti pendidikan, para peserta P4N 68 dibekali materi kepemimpinan yang mencakup karakter kenegarawanan, empat konsensus dasar bangsa, wawasan nusantara, kewaspadaan nasional, geopolitik dan geostrategis, hingga pemahaman

mengenai program Astacita dan program prioritas nasional. Para peserta juga mendapatkan pengayaan di bidang akuntabilitas keuangan, komunikasi publik, sistem manajemen nasional, serta studi strategis dalam dan luar negeri.

Sebagai puncak pembelajaran, para peserta P4N 68 menyumbangkan gagasan melalui seminar nasional bertajuk “Transformasi Ekosistem Pertanian Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”. Atas capaian tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kesungguhan, dan kekompakan peserta selama mengikuti pendidikan.

“Melalui proses pembelajaran yang saudara ikuti, Lemhannas mengharapkan saudara siap menjadi kader pemimpin nasional yang dapat menjadi contoh dan teladan, termasuk harus menjadi agen perubahan (agent of change) dalam setiap bidang pengabdian yang akan dijalani,” ungkapnya.

Pada acara tersebut, diumumkan penerima penghargaan bagi peserta terbaik. Predikat Akademik Terbaik dengan akumulasi nilai tertinggi diraih Marsma TNI David Yohan Tamboto, S.Sos. Sementara itu, penghargaan untuk Predikat Taskap Terbaik diberikan kepada Kombes Pol Budiman Bostang Panjaitan, S.H., S.I.K., M.H.

Seluruh lulusan P4N 68 secara resmi bergabung menjadi anggota IKAL-Lemhannas. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL-Lemhannas masa bakti 2025–2030 oleh Wakil Ketua Umum I DPP IKAL-Lemhannas, Komjen Pol (Purn) Drs. Togar M. Sianipar, M.Si.



#LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Gubernur Lemhannas RI Sampaikan Nilai-Nilai Kebangsaan

Pada Kegiatan PKKMB Universitas Trisakti

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., hadir sebagai narasumber pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Trisakti, Jumat (29/8). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kuliah umum berjudul

Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai Kohesi Sosial Generasi Muda pada Tantangan Era Global.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI mengungkapkan rasa bangganya berada di tengah mahasiswa baru yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. "Saya berbangga hati bisa berdiri di tengah-tengah para calon pemimpin

yang nanti akan menjadi pendekar-pendekar hukum di negeri yang kita cintai," ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemuda selalu memainkan peran penting dalam sejarah perubahan Indonesia, mulai dari Sumpah Pemuda, peristiwa Rengasdengklok, hingga reformasi 1998. Ia juga mengutip pesan Presiden Soekarno, "Beri aku



seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncangkan dunia,” untuk menegaskan besarnya tanggung jawab generasi muda, termasuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dalam menggelorakan semangat kebangsaan.

Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak keistimewaan, seperti keanekaragaman hayati, hutan tropis yang luas, keragaman budaya, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis pada jalur perekonomian dunia. Namun, keunggulan tersebut dibayangi tantangan serius, antara lain konstelasi geopolitik global, dinamika geoekonomi, perebutan sumber daya alam, transnational crime, disrupsi teknologi, bencana geologi di wilayah ring of fire, serta perubahan iklim. “Situasi geopolitik mengharuskan kita semua sadar betul bahwa penguatan nasionalisme merupakan syarat untuk bisa menjadi negara maju,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyoroti sejumlah keprihatinan dalam negeri, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga keterbatasan fasilitas dasar bagi anak sekolah. Menurutnya, salah satu faktor penyebab adalah lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari Rule of Law Index Indonesia yang menempati peringkat ke-68 dari 142 negara, menunjukkan tantangan besar bagi terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya memperkuat nasionalisme di tengah tantangan eksternal, seperti rivalitas kekuatan besar, revolusi digital, disrupsi budaya, perang dagang, hingga konflik global seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Ia mengingatkan bahwa dunia kini kembali pada prinsip my country first, sehingga Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, ketahanan nasional adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045.

Bonus demografi yang dimiliki pemuda saat ini merupakan modal penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. “Kemajuan bangsa itu ditentukan oleh para pemimpin muda yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga tangguh untuk menciptakan kemandirian bangsa di tengah tantangan nasional yang kita hadapi ini,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Menutup kuliah umum, ia berpesan agar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti membekali diri dengan karakter yang kuat, integritas tinggi, kecintaan pada tanah air, serta kesadaran geopolitik dan wawasan kebangsaan. Ia berharap generasi muda tidak hanya fokus menuntut ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan dan pilar penjaga ketahanan nasional. “Karena insya Allah, ke depan akan semakin banyak dari Trisakti ini lahir para pemimpin bangsa yang akan membawa kemajuan bagi negara yang kita cintai,” pungkasnya.



PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANAKATAN 67

Lemhannas RI Bahas RKA T.A. 2026 Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

”*Lemhannas siap melaksanakan RKA 2026 dengan penuh tanggung jawab demi memperkuat ketahanan nasional Indonesia.*”



Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (3/9). Kehadirannya didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., para deputy, direktur, serta kepala biro Lemhannas RI.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., membahas rencana kerja

dan anggaran (RKA) Lemhannas RI Tahun Anggaran 2026. Agenda ini penting untuk memastikan program-program strategis Lemhannas RI dapat berjalan efektif dalam memperkuat ketahanan nasional dan menjawab tantangan geopolitik, ekonomi, serta sosial yang dihadapi Indonesia.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., dan berlangsung interaktif. Anggota Komisi I memberikan sejumlah masukan dan catatan agar anggaran Lemhannas digunakan lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti masukan DPR. "Lemhannas siap melaksanakan RKA 2026 dengan penuh tanggung jawab demi memperkuat ketahanan nasional Indonesia," ujarnya.

Selain Lemhannas RI, RDP juga diikuti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang turut menyampaikan rencana kerja dan anggarannya masing-masing.

Gubernur Lemhannas RI Terima Audiensi BPKH
**Bahas Penguatan
Ekosistem Haji dan Umrah**



Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK., beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (9/9). Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., turut hadir mendampingi jajaran BPKH dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prof. Muhadjir menyampaikan gagasan penyelenggaraan penguatan ekosistem haji dan umrah. Menurutnya, penguatan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antarpemangku kepentingan, memperkuat koordinasi, serta membangun kolaborasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Salah satu rencana yang dibahas adalah penguatan wawasan dan semangat kebangsaan bagi anggota BPKH serta penyelenggara haji dari berbagai

instansi terkait. "Saya kira dengan ada banyaknya masalah pada tata kelola haji, akan lebih bagus kalau kita mengadakan pemantapan ideologi dan komitmen dari entitas haji untuk mensukseskan dan mendukung program Asta Cita Presiden, sekaligus memberikan nilai peringatan bahwa haji ini adalah pekerjaan, tetapi ada nilai sakral di situ," ujar Prof. Muhadjir.

Fadlul Imansyah selaku Ketua Badan Pelaksana BPKH kemudian memaparkan rencana teknis kegiatan penguatan ekosistem haji dan umrah kepada Gubernur Lemhannas RI.

Menanggapi hal itu, Gubernur Lemhannas RI menyatakan keterbukaan dan kesiapannya mendukung rencana tersebut. Lemhannas RI, menurutnya, bersedia merumuskan materi penguatan karakter sumber daya manusia, khususnya nilai-nilai kebangsaan. "Tentu karakter yang kita bangun adalah karakter kebangsaan, karakter yang mementingkan kepentingan negara," kata Gubernur Lemhannas RI.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, dengan pendekatan yang lebih humanis dan menasar target yang tepat agar tujuan penyelenggaraan haji dan umrah tercapai. Selain nilai kebangsaan, ia menegaskan perlunya memasukkan materi tentang integritas sebagai bagian dari penguatan karakter.

Sebelum pelaksanaan kegiatan penguatan ekosistem haji dan umrah, BPKH dan Lemhannas RI berencana mengupayakan kolaborasi formal melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Turut hadir jajaran BPKH, antara lain Sekretaris Badan BPKH, H. Ahmad Zaky, M.B.A.; Deputi SDM, Pengadaan, dan Operasional Umum BPKH, Satyo Mindrowo, S.Psi., M.M.; Kepala Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol, Hari Yadi; Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan, Nurul Qoyimah; Kepala Divisi Komunikasi Strategis, Demmy Romayansyah Budiawan; Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rio Lazuardy; serta segenap anggota Badan Pelaksana BPKH.



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Lemhannas RI dan BPS RI Perkuat Sinergi Data untuk Ketahanan Nasional

Lemhannas RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPS RI, Selasa (9/9). Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan ketahanan nasional berbasis data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan bahwa peran BPS sangat vital dalam menyediakan data bagi pengambilan keputusan nasional. "BPS memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan berbagai data bagi ketahanan nasional," ujarnya. Ia



menambahkan, setidaknya 50 persen data yang digunakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI berasal dari BPS. Dukungan ini, lanjutnya, bukan hanya memperkuat analisis strategis, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi Lemhannas berbasis pada data.

Kolaborasi tidak berhenti pada penyediaan data. BPS RI juga berkontribusi sebagai narasumber dalam rapat penyusunan rekomendasi maupun program pendidikan Lemhannas RI. Menurut Gubernur Lemhannas, hal ini penting agar pimpinan nasional benar-benar dapat mengambil kebijakan berdasarkan bukti, bukan asumsi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D.,

menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai pengukuran ketahanan nasional semakin relevan di tengah tantangan global yang dinamis. "Kami memahami pentingnya data yang bisa kami dukung untuk menopang assessment Lemhannas secara objektif dan terstruktur," tuturnya. BPS juga berkomitmen memfasilitasi kerja sama lintas lembaga apabila dibutuhkan data dari luar BPS, sekaligus memastikan kualitasnya.

Selain itu, BPS RI membuka ruang kolaborasi lebih luas melalui Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang mencakup bidang ketahanan kewilayahan, lingkungan, dan kesejahteraan rumah tangga. Menurut Amalia, pendekatan strategis Lemhannas RI dalam mengkaji isu-isu kebangsaan seperti kemiskinan, konflik horizontal, urbanisasi, hingga

degradasi budaya akan memperkaya analisis BPS, terutama pada aspek sosial. "Kami butuh insight dari Lemhannas agar interpretasi data menjadi lebih tajam dan relevan bagi pengambil kebijakan," tambahnya.

Kerja sama ini menandai langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang terintegrasi. Dengan sinergi antara Lemhannas RI dan BPS RI, potret ketahanan nasional tidak hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi juga diperkaya dengan analisis strategis yang mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, hingga geopolitik bangsa. Dampaknya, masyarakat akan merasakan manfaat nyata berupa kebijakan yang lebih tepat sasaran, responsif terhadap tantangan zaman, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.



#LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

LEMHANNAS GOES TO CAMPUS DI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



Lemhannas RI menggelar program Lemhannas Goes To Campus di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kamis (18/9), bertempat di Grand Auditorium Untirta. Program ini menjadi sarana strategis untuk membangun komunikasi dengan civitas akademika sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kampus bukan hanya sekadar lembaga yang mencetak ilmuwan, tetapi juga kawah candradimuka bagi proses kepemimpinan nasional dan lahirnya pejuang-pejuang bangsa,” ujar Gubernur

Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan bahwa setiap fase penting dalam perjalanan bangsa mulai dari Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga Reformasi 1998 selalu digerakkan oleh keberanian kaum muda.

Ace juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia. Secara internal, kualitas sumber daya manusia, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi menjadi kunci kemajuan bangsa. Sementara itu, tantangan eksternal mencakup dinamika geopolitik global, mulai dari persaingan kekuatan besar,



perang dagang, konflik Rusia–Ukraina hingga Israel–Palestina, serta disrupsi budaya yang kian terasa.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi membawa dua sisi: kemajuan di satu sisi, sekaligus risiko di sisi lain seperti cyberbullying, kesehatan mental, pola pikir instan, hingga ketergantungan pada gawai. Karena itu, menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penggerak literasi geopolitik membekali mahasiswa dengan wawasan global tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.



“Ketahanan nasional adalah kemampuan seluruh komponen bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan demi menjaga eksistensi serta kelangsungan hidup negara. Aspek paling fundamental dari ketahanan nasional adalah memperkokoh nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya di hadapan ratusan mahasiswa Untirta.

Gubernur Lemhannas RI berharap Untirta dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya berprestasi akademik, tetapi juga berkarakter kebangsaan. “Perguruan tinggi membentuk karakter, watak, dan jiwa nasionalisme generasi muda untuk mempersiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.



Hadir dalam acara tersebut Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Rusmana, Ir., M.P.; Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum Prof. Dr. Ing. Ir. Asep Ridwan, S.T., M.T., IPU.; serta Kapolda Banten Brigjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan dukungan nyata bagi penguatan peran mahasiswa sebagai motor perubahan bangsa.

#LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Gubernur Lemhannas RI: Mahasiswa Harus Jadi Agen Perubahan Berkarakter Pancasila

Universitas Pancasila menjadi salah satu kampus yang mendapat perhatian khusus dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Hal ini terlihat dari kehadiran Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun

Akademik 2025/2026 di Universitas Pancasila pada Senin (15/9).

Dalam kesempatan tersebut, Ace Hasan menyampaikan pesan yang sarat makna. Menurutnya, kampus tidak boleh dipandang sebatas tempat menuntut ilmu, melainkan harus menjadi pusat pembentukan karakter kebangsaan. "Universitas Pancasila bukan hanya

sekadar lembaga pendidikan, tetapi Universitas Pancasila akan menjadi kawah candradimuka bagi pembentukan karakter kebangsaan," ujarnya di hadapan mahasiswa baru.

Ia menekankan bahwa setiap mahasiswa yang kini telah resmi menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Pancasila memiliki tanggung jawab moral. Mereka



harus menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. "Seluruh civitas akademika Universitas Pancasila harus menjadi teladan bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila," tambahnya.

Lebih jauh, Ace Hasan mengingatkan peran historis generasi muda dalam perjalanan bangsa. Indonesia, kata dia, bisa berdiri tegak hingga saat ini karena adanya kaum muda yang berani, tangguh, dan berkarakter. Dari lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga Reformasi 1998, selalu ada jejak anak muda di dalamnya. Karena itu, mahasiswa baru diharapkan dapat meneladani semangat tersebut.

Ace juga menyoroti tantangan bangsa Indonesia saat ini yang semakin kompleks. Di tingkat global, dunia dihadapkan pada konflik wilayah, perubahan iklim, hingga perang dagang yang memengaruhi stabilitas internasional. Sementara di dalam negeri, Indonesia masih harus menghadapi kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, serta menurunnya kohesi sosial. Dalam situasi seperti ini, generasi muda dituntut mampu memahami geopolitik global, membaca peta kekuatan internasional, dan menempatkan Indonesia pada posisi strategis.

Menurutnya, membangun ketahanan nasional tidak bisa dilakukan secara

instan, melainkan harus dimulai dari penguatan ideologi. Pancasila menjadi fondasi utama, disusul UUD 1945 sebagai pedoman konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan, dan NKRI sebagai bentuk final negara. "Saya mengajak adik-adik sekalian, karena adik-adik berada di Universitas Pancasila, mari kita kuatkan nilai-nilai kebangsaan kita. Jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam membangun bangsa," tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh berhenti hanya pada aktivitas akademik. Menurut Ace Hasan, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton, melainkan harus tampil sebagai pilar penjaga ketahanan nasional. Sebagai calon pemimpin bangsa, mereka harus berkarakter kuat, memiliki integritas tinggi, mencintai tanah air, memahami wawasan kebangsaan, serta memiliki kesadaran geopolitik.

Dalam ceramahnya, ia juga mengutip pesan Presiden Soekarno yang tetap relevan hingga kini. "Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, sedangkan berpikir tanpa belajar sangat berbahaya," katanya. Kutipan tersebut dimaksudkan sebagai pengingat bahwa ilmu pengetahuan harus selalu diiringi dengan refleksi kritis, dan sebaliknya, berpikir kritis harus dilandasi ilmu yang memadai.

Ace menekankan bahwa masa kuliah adalah waktu emas bagi mahasiswa untuk membentuk diri. Kesempatan belajar di perguruan tinggi bukan sekadar untuk meraih gelar, tetapi untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan bangsa. Ia berharap Universitas Pancasila benar-benar menjadi "rumah pembentuk karakter bangsa" yang berlandaskan empat konsensus dasar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam penutupnya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapan agar mahasiswa Universitas Pancasila menjadi generasi yang unggul secara akademik sekaligus kokoh secara moral dan kebangsaan. "Jadikan Universitas Pancasila sebagai rumah pembentuk karakter bangsa berlandaskan empat konsensus dasar bangsa untuk mencetak pemimpin nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Kegiatan PKKMB Universitas Pancasila tahun ini bukan sekadar penyambutan mahasiswa baru, melainkan momentum strategis. Melalui kegiatan ini, Lemhannas RI ingin memastikan bahwa bonus demografi Indonesia tidak menjadi beban, melainkan berkah yang dapat mendorong bangsa menuju cita-cita besar: Indonesia Emas 2045.





Solusi 2 Negara: Meredakan Ketegangan Kawasan Timteng dan Peran Indonesia

Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M.

Wakil Koordinator Tenaga Ahli Pengkaji Lemhannas RI

Asta Cita Presiden Prabowo Gibran digunakan sebagai kompas yang dilakukan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan Ketahanan Nasional dengan selalu mendorong peningkatan kepemimpinan di fora global agar dapat memberikan kontribusi nyata bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi bagi dunia.

Kontribusi Indonesia pada peristiwa kemanusiaan di Timur Tengah khususnya di wilayah Gaza memperlihatkan betapa bangsa Indonesia yang sangat cinta damai berusaha secara maksimal dengan langkah nyata bergerak bersama entitas dunia lainnya melakukan upaya bantuan yang dibutuhkan warga Gaza.

Konflik Tak Berujung

Sejarah ketegangan sebenarnya sudah berlangsung sangat lama dan semakin memuncak di era modern dengan dibentuknya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Ketidakpuasan negara-negara Arab akhirnya melahirkan perang pertama antara Arab dengan Israel sebagai sebuah negara, hanya sehari setelah pernyataan

pendirian negara Israel. Sejarah mencatat Israel akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Negara yang baru terbentuk tersebut ternyata sanggup mengalahkan koalisi arab dengan menyatukan seluruh faksi bersenjata menjadi kekuatan pertahanan yang solid. Dalam perjalanan sejarah dan letusan munisi dari waktu ke waktu, nyawa dan penderitaan manusia seolah tidak berarti. Kekisruhan terus terjadi dan tak terhentikan dengan Israel terus memperluas wilayah yang dikuasai melebihi batas-batas yang diatur oleh PBB pada resolusi 181 tahun 1947.

Situasi semakin rumit ketika penguasaan Gaza berada dibawah kendali Hamas yang secara ideologis sangat menentang Israel. Gerakan perlawanan terus berlanjut sampai akhirnya perang besar diantara kedua bangsa ini menjadi sebuah bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan dan menjadi keprihatinan hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia.

Dominasi kekuatan militer Israel sesungguhnya bukan lawan sepadan bagi kelompok Hamas. Secara militer dan teknologi IDF sangat dominan terhadap penguasaan wilayah di Gaza. Kegagalan IDF dalam mengantisipasi upaya gerilya Hamas dalam operasi Badai al-Aqsa menimbulkan kerugian cukup besar bagi Israel, tapi pada akhirnya hal ini jugalah yang memicu krisis kemanusiaan mengerikan.

Kompleksitas Persoalan dan Proxy

Negara paling kuat untuk menjadi penantang serius Israel adalah Iran. Solidaritas kemanusiaan dan aksi bermusuhan jelas ditunjukkan oleh Iran dalam sikap dan tindakan. Kekuatan Iran di kawasan memang tidak bisa dianggap sepele. Iran telah menjelma menjadi kekuatan pertahanan yang terus berkembang meskipun menghadapi sanksi ekonomi oleh AS dan negara-negara sekutunya.

Dominasi Israel terhadap situasi Timur Tengah membuat banyak negara arab lebih mudah mengikuti keinginan Israel dan justru kurang tertarik dengan isu Palestina. Isu Abraham Accords terlihat lebih menarik sebagai upaya merangkul negara monarki arab dan Afrika Utara yang dimediasi oleh AS. Inisiatif perdamaian yang baik ini memiliki ironi dibanding dengan situasi warga Palestina khususnya di Gaza yang terus diblokade dan terkucil.

Di lain sisi, Iran terus membangun kekuatan proxynya di Suriah, Lebanon, Irak dan Yaman. Proxy-proxy ini secara intens terus melakukan tekanan kepada Israel dengan isu utama Palestina. Namun ketika kepemimpinan Suriah berganti, maka proxy Lebanon juga ikut surut. Sementara itu dalam kondisi ketegangan yang memuncak, perang

Israel-Iran tak dapat terhindarkan. Perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut menimbulkan kerugian nyawa dan finansial yang sangat besar. Perang tersebut juga memperlihatkan kapasitas yang sebenarnya dari kedua negara dalam melakukan serangan jarak jauh dan seberapa hebat teknologi rudal, drone, pesawat tempur yang didukung operasi intelijen dan siber pada perang masa kini.

Kebuntuan Dan Krisis Kemanusiaan

Korban terus berjatuh akibat aksi militer Israel di Gaza. Rakyat sipil menjadi korban terbesar dari perang yang sampai saat ini masih belum tahu kapan berakhirnya. Dunia menyuarakan keprihatinan dan bahkan ICC menyebutkan para pemimpin kedua belah pihak yang bertanggungjawab sebagai penjahat perang. Anggota Dewan Keamanan PBB kecuali AS menyatakan bahwa bencana kelaparan di Gaza adalah buatan manusia.

Masyarakat dunia saat ini begitu gelisah dengan aksi militer yang tak kunjung selesai di wilayah Gaza meskipun upaya untuk penyelesaiannya tidak pernah berhenti. Dukungan dunia saat ini memperlihatkan bahwa solusi dua negara dianggap sebagai jalan terbaik untuk penyelesaian masalah. Solusi dua negara adalah sebuah gagasan bahwa dua negara berdaulat (Israel dan Palestina) dapat hidup berdampingan secara damai di dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Tapi hal ini tentunya tidak menurut Israel dan AS, karena alasan jaminan keamanan negara. Situasi ini sungguh bukan persoalan mudah untuk ditengahi mengingat akar konflik yang begitu panjang. Apalagi kawasan pemukiman ilegal yahudi terus berkembang di Tepi

Barat dan sulit dihentikan. Sementara itu upaya memindahkan warga Gaza keluar dari wilayah tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari AS.

Peran Strategis Indonesia

Situasi yang terjadi di Gaza Palestina begitu menyedihkan, Indonesia dalam diplomasinya sudah melakukan langkah-langkah cukup agresif dan nyata dalam membantu penderitaan warga Gaza. Bantuan kemanusiaan melalui KRI dan pesawat militer sudah dilakukan untuk mengurangi penderitaan.

Diplomasi melalui OKI dan Non Blok juga sudah dibangun untuk secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan dan mencari solusi damai. Mendukung keputusan ICC atas penangkapan para penjahat perang meskipun Indonesia bukan sebagai negara anggota ICC. Indonesia juga dapat memberikan dukungan kepada Afsel atas tuduhan genosida yang terjadi di Gaza.

Dalam konteks solusi dua negara, maka sidang umum PBB bulan September 2025 adalah kesempatan sangat baik bagi banyak negara di dunia termasuk Indonesia menyuarakan konsensus bersama solusi dua negara tersebut. Kesempatan ini harus disuarakan sebagai tekanan internasional atas aksi sepihak yang sangat di luar batas pri kemanusiaan. Tekanan lain dalam bentuk gerakan BDS (Boikot, Divestasi dan Sanksi)

bisa digelorkan untuk memaksakan upaya damai sebagai bagian tekanan dunia.

Penutup

Dinamika antara Israel, Palestina dan Iran tidak bisa dipisahkan dari struktur sejarah dan kekuasaan regional. Perlunya kerja sama internasional dan regional dalam meredakan ketegangan dan membangun masa depan Timur Tengah yang stabil. Peran negara besar seperti AS sangat dominan menentukan kemana kawasan ini akan mengarah. Tumbuhnya kekuatan penyeimbang baru seperti Rusia, China bahkan Iran dalam tatanan dunia yang multipolar akan perlahan merubah situasi Timur Tengah. Indonesia meskipun secara geografis memiliki jarak yang cukup jauh, harus terus memperlihatkan kemampuan diplomasinya secara nyata dan berdampak langsung.





MARSEKAL MUDA TNI Ir.

BOB HENRY PANGGABEAN, M.I.P.

“Selain kejujuran dan profesionalisme, konsistensi adalah prinsip hidup saya...”

Marsekal Muda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P., saat ini mengemban amanah sebagai Deputi Pendidikan Lemhannas RI. Dalam peran strategis tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang tangguh, berkarakter, dan berintegritas.

Lahir dari keluarga Batak dan besar di Jakarta, Bob Henry tumbuh dalam suasana yang kental dengan nilai kedisiplinan. Sesuai adat Batak yang mengikuti garis keturunan ayah, ia bermarga Panggabean dari pihak ayah dan bermarga Butarbutar dari pihak ibu. Dari empat bersaudara, ia adalah anak ketiga dengan dua kakak perempuan serta seorang adik laki-laki.

Sejak kecil, dunia militer, khususnya TNI Angkatan Udara, sudah akrab dalam kehidupannya. “Ayah saya adalah seorang anggota TNI Angkatan Udara, lulusan tahun 1962. Pada masa itu, pendidikan penerbang banyak dilakukan di luar negeri, dan ayah saya menempuh pendidikan penerbang di Cekoslowakia, termasuk menjalani masa taruna di sana. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau kembali ke Indonesia dan dilantik sebagai perwira,” kenangnya.

Keteladanan ayahnya sebagai penerbang dan perwira TNI AU menjadi sumber inspirasi yang besar. Disiplin, wibawa, dan integritas sang ayah membekas kuat dalam dirinya, menumbuhkan tekad untuk mengikuti jejak pengabdian tanpa pernah diminta secara langsung. Sejak kecil, cita-cita menjadi perwira TNI AU telah tumbuh dan mengakar dalam dirinya.

Pendidikan dasar ia tempuh di Jakarta. Bob bersekolah di SD Halim, kemudian melanjutkan ke SMP Halim, dan akhirnya menuntaskan masa remajanya di SMA Negeri 12 Jakarta Timur (Klender). Setelah lulus, ia mengikuti seleksi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan berhasil lolos. Tanpa ragu, ia memilih matra Angkatan Udara, sejalan dengan obsesinya sejak kecil terhadap profesi sang ayah.

Marsekal Muda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P., lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada tahun 1991 sebagai penerbang tempur. Penugasan pertamanya adalah di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang. Di satuan ini, ia mengawaki pesawat OV-10 Bronco, pesawat serang dan observasi ringan bermesin turboprop ganda yang dirancang untuk pertempuran counterinsurgency atau anti pemberontakan yang pada masa itu banyak digunakan dalam operasi menghadapi perang gerilya.

Memasuki awal 2000-an, ia dipindahkan ke Madiun dan bertugas sebagai penerbang pesawat Hawk MK-53, pesawat tempur ringan sekaligus pesawat latihan multifungsi buatan British Aerospace Industries (BAe) dari Inggris. Kedua jenis pesawat tersebut memiliki sejarah panjang dalam pengabdian TNI AU dan menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya sebagai penerbang.

Kariernya kemudian berlanjut ke posisi operasional dengan menjabat Kadisops Lanud SPO. Setelah itu, ia mendapat penugasan di bidang perencanaan strategis sebagai Pabandya Jakstra Paban 1



Renstra Srenau, lalu dipercaya sebagai Kalambangja Kodik AU. Kemampuannya memimpin terus diakui, hingga ia diangkat menjadi Danwingdik Terbang Lanud Adi Sucipto dan kemudian Danlanud PTM.

Selain pengalaman lapangan, Bob Henry juga berkiprah di bidang akademik. Ia pernah menjabat sebagai Dosen Utama Seskoau, lalu kembali mengemban amanah strategis sebagai Paban II/Lat Ditdiklat Kodiklat AU, Paban Litbang Asro Srenau. Rangkaian jabatan ini memberinya wawasan komprehensif, baik dalam pembinaan personel maupun penelitian dan pengembangan di lingkungan TNI AU.

Puncak kariernya semakin menonjol saat ia dipercaya memimpin sebagai Danlanud Adi Sucipto, kemudian naik ke posisi strategis sebagai Dirdok Kodiklat AU, dan selanjutnya menjabat Waaspers Kasau Spers AU. Dengan pengalaman panjang yang meliputi pendidikan, operasi, penelitian, hingga perencanaan, ia akhirnya mengemban amanah sebagai Deputy Pendidikan Lemhannas RI.

Bagi Marsekal Muda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P., tempat dinas yang paling berkesan adalah Skadron Udara 15 di Lanud Iswahjudi. Di satuan inilah ia meniti karier sekaligus membangun keluarga.

“Saya bertemu dengan istri saya saat sedang mengikuti pendidikan lanjutan. Pada saat itu, saya sedang dalam masa transisi antara lulus perwira dan akan masuk pendidikan sekolah penerbang di Yogyakarta. Perkenalan kami berlanjut hingga akhirnya kami menikah pada tahun

2001,” tutur pria yang telah dikaruniai dua orang putri dan seorang putra.

Bersama sang istri, ia memulai kehidupan rumah tangga dari nol, melewati keterbatasan ekonomi, dan menorehkan banyak kenangan. Bahkan, anak kembarnya lahir ketika ia berdinast di skadron tersebut. Skadron Udara 15 bukan sekadar satuan kerja, melainkan bagian penting dari perjalanan hidupnya yang meninggalkan jejak hormat dan kebanggaan mendalam.

“Anak kembar kami kini sudah dewasa, dan salah satunya bahkan telah menjadi Letnan Penerbang di Skadron 2 Halim, mengikuti jejak saya dan kakeknya. Sementara saudara kembarnya diterima di Teknik Elektro UPN melalui jalur undangan juga. Jadi mereka berpisah—yang satu memilih dunia militer, sementara yang satu lagi tetap menjalani jalur akademik. Anak saya yang mengambil Teknik Elektro itu kini sudah lulus dan bulan Agustus nanti akan mengikuti pendidikan SIPSS Polri,” tutur pria yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan Lemhannas RI pada tahun 2021.

Perjalanan karier Bob Henry Panggabean tidak terlepas dari dukungan sang istri. Sejak awal menikah, istrinya aktif dalam berbagai kegiatan pendamping TNI Angkatan Udara. Ia bergabung dengan PIA Ardhy Garini dan hingga kini tetap aktif, bahkan menjabat sebagai Kepala Bidang Kurikulum di SMA Pradita Dirgantara di bawah Yayasan Ardhy Garini. Baginya, peran istri di lingkungan TNI AU bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga bagian penting dalam organisasi istri prajurit.

“Saya percaya, banyak keberhasilan yang saya raih tidak lepas dari dukungan total istri. Bahkan sering kali, di tengah kesibukan saya, istri justru lebih sibuk dari saya. Kadang beliau pulang lebih malam karena kegiatan organisasi dan tanggung jawab di sekolah,” ungkap Bob Henry Panggabean.

Sebagai Deputy Pendidikan Lemhannas RI, Marsekal Muda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P., tidak hanya menjalankan visi pimpinan, tetapi juga membawa nilai-nilai pribadi yang ia pegang teguh: kejujuran, konsistensi, dan profesionalisme. Ia meyakini bahwa lembaga pendidikan seperti Lemhannas RI memiliki relasi yang sangat dekat dengan para peserta didik, sehingga menuntut tanggung jawab moral yang besar. “Saya berkomitmen untuk menempatkan diri secara profesional—tidak menyalahgunakan kewenangan atau mencampuradukkan urusan pribadi dengan tugas. Saya ingin menjalankan amanah ini dengan tetap teguh pada aturan, menjaga marwah lembaga, dan sejalan dengan nilai-nilai yang saya yakini sebagai kebenaran,” tegas pria penerima Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya ini.

Dalam pelaksanaan tugas, Bob Henry menekankan pentingnya integritas. Salah satu wujud nyatanya adalah menjaga kerahasiaan nilai peserta sesuai arahan pimpinan, agar sistem pendidikan tetap terjaga kredibilitasnya. “Selain kejujuran dan profesionalisme, konsistensi adalah prinsip hidup saya,” ujarnya, menegaskan betapa disiplin moral menjadi kunci menjaga nama baik lembaga.

Lebih jauh, ia melihat bahwa kekuatan bangsa Indonesia dibanding banyak negara lain terletak pada masih kokohnya norma agama sebagai fondasi moral. Norma tersebut, menurutnya, berfungsi sebagai penuntun kehidupan sosial, menjaga etika, sekaligus menjadi benteng masyarakat dalam menghadapi derasnya perubahan zaman. Baginya, hal ini merupakan karunia besar yang patut disyukuri.

Dalam menjalani karier maupun kehidupan pribadi, Bob Henry berpegang pada prinsip hidup sederhana: bersikap profesional, bekerja dengan niat baik, menjaga integritas, dan senantiasa berdoa. Ia percaya, kunci kehidupan adalah berusaha melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan.

Pemerintah siapkan **Paket Stimulus Ekonomi 2025-2026**



Paket Stimulus Berupa:

8 Program
akselerasi
pada 2025

4 Program
dilanjutkan
di program
2026

5 Program
penyerapan
tenaga kerja

8 Program Akselerasi pada 2025

- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (Uang saku setara UMP Rp3,3 juta selama 6 bulan)
- Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata
- Bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan
- Bantuan luran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
- Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
- Percepatan Deregulasi PP28
- Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) Perbaikan Kualitas Pemukiman dan Penyediaan Platform Pemasaran dan Gigs UMKM

4 Program Dilanjutkan di Program 2026

- Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai 2029 serta penyesuaian penerima
- PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM
- Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkat pariwisata (APBN 2026)
- PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya (APBN 2026)
- Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU)

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

- Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
- Program Revitalisasi Tambak Pantura
- Program Modernisasi Kapal Nelayan
- Program Perkebunan Rakyat

● PROFIL PEGAWAI

Fedora Esperanza

dan Perjalanan Hidup yang Tidak Terduga

Bagi Fedora, hidup adalah serangkaian perjalanan yang tak selalu bisa ditebak arahnya. Lahir di Ambon, sebuah kota yang sarat akan budaya di Timur Indonesia, Fedora hanya tinggal di kota tersebut hingga dirinya berumur satu tahun. Kerusuhan sosial yang terjadi pada saat itu memaksa ibunya mengambil keputusan dengan berpindah ke Tangerang Selatan, tepatnya Pamulang. "Karena waktu itu kebetulan lagi kerusuhan di Ambon, ya jadi keluarga pindah ke pamulang," ujar Fedora.

Kepindahan ini menjadi awal kehidupannya sebagai perantau. Di Pamulang, Fedora kecil tinggal bersama sang ibu sementara sang ayah bekerja di Papua. Masa kecil hingga SMA ia habiskan di kota tersebut. Namun dunia perkuliahan membawanya jauh ke timur, ke Universitas Hasanuddin, Makassar. Dirinya memilih menempuh jenjang S1 di Kota Ini juga karena pesan kedua orang tuanya. "Waktu itu permintaan orang tua itu sebatas waktu mau kuliah mintanya pilih kampus yang ada keluarga di daerah itu, jadi waktu cuma boleh tes UI dan Unhas karena waktu itu di Makassar ada tante," jelasnya.

Jurusan Ilmu Politik juga dipilihnya bukan tanpa alasan. Sejak SMP, Fedora sudah memiliki cita-cita menjadi seorang diplomat. Ia awalnya ingin masuk Jurusan Hubungan Internasional, namun akhirnya memilih jurusan lain yang dapat mendukung cita-citanya tersebut yaitu Ilmu Politik. "Waktu itu cita-cita awalnya pengen jadi diplomat. Jadi milih Hi (Hubungan Internasional) tapi kira-kira jurusan lain yang bisa mendukung cita-cita jadi diplomat? waktu itu aku milihnya Ilmu politik. Karena aku pikir mungkin bisa belajar politik luar negeri," ujarnya.

Ternyata keputusan itu bukan jalan buntu. Justru selama kuliah, Fedora mendapatkan kesempatan untuk magang di KBRI Beijing, sebuah langkah awal untuk merasakan dunia diplomatik secara langsung. "Magangnya apply sendiri ke KBRI. Aku cuma pengen tahu suasana kerjanya kayak gimana," katanya.

Setelah lulus kuliah di tahun 2020, perjalanan Fedora dalam dunia kerja dimulai dengan menjadi pegawai honorer di Universitas Pattimura, Ambon. Di tengah pandemi tahun 2021, ia berpikir untuk mencoba dua hal sekaligus: mendaftar beasiswa Australia Awards Scholarship (AAS) dan mengikuti seleksi CPNS sebagai Calon Diplomat. Namun, jalan rencana



tidak selalu berjalan mulus. Saat mendaftar CPNS di tahun 2021, formasi untuk Ilmu Politik tidak tersedia di Kementerian Luar Negeri. Justru jurusan yang diterima saat itu adalah HI, Komunikasi, dan Sastra. Fedora kemudian memutuskan untuk tetap mencoba mendaftar ke lembaga-lembaga lain yang menerima sarjana Ilmu Politik tanpa ekspektasi besar. Dirinya saat itu berpikir bahwa mendaftar CPNS hanya untuk latihan, terutama agar bisa siap saat formasi diplomat di Kementerian Luar Negeri tersedia. Ia pun akhirnya memutuskan mendaftar formasi CPNS di Lemhannas RI.

Fedora mengaku saat itu dirinya belum terlalu memahami tugas dan fungsi Lemhannas RI. namun, kedua orang tuanya mendukung dirinya untuk mendaftar CPNS di Lemhannas RI. ia menuturkan bahwa kedua orang tuanya justru lebih mengenal Lemhannas daripada dirinya kala itu. Selain itu pertimbangan penempatan yang berlokasi di Jakarta Pusat menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya memilih Lemhannas RI. "Aku pilih Lemhannas karena waktu itu cari yang penempatannya pasti di Jakarta, dan jurusanku nyambung. Jadi pilih Lemhannas aja," katanya sambil tertawa.

Dorongan kedua orang tuanya terutama sang ibu inilah yang mendorongnya mantap untuk sekaligus mendaftar beasiswa Australian Awards Scholarship. Fedora merasa tidak percaya diri karena saat ini ia merupakan seorang fresh graduate. "Aku juga ngga pede (percaya diri). aku ngerasa fresh graduate apa bisa dapat beasiswa, tapi mama yang waktu itu bener - bener men-encourage untuk 'kamu tuh bisa, mama tau kamu punya kemampuan untuk dapat beasiswa lanjut S2', jadi aku ikutin aja maunya mama," jelasnya.

Yang mengejutkan, dirinya kemudian dinyatakan lolos CPNS dan juga lolos menjadi salah satu penerima beasiswa AAS (Australia Awards Scholarship). Dalam waktu yang bersamaan, dua jalan terbuka di depan mata. "Desember awal itu ada pengumuman Australia Awards keterima, terus Desember akhir aku inget banget 24 malem karena lagi ngumpul sebelum natal. Itu ternyata ada pengumuman, aku keterima juga ini lemhannas," jelasnya sembari tersenyum mengingat saat itu.

Sempat dilanda rasa bimbang, Fedora akhirnya memutuskan menjalani pelatihan pra-keberangkatan dari beasiswa terlebih dahulu selama sembilan minggu, sembari terus berkoordinasi dengan pihak

Lemhannas terkait statusnya. "Aku bener-bener bingung harus milih yang mana. Tapi karena beasiswanya udah diterima duluan, aku jalanin pelatihan 9 minggu dulu dari Januari sampai Maret 2022," ceritanya.

Sementara itu, masa kerja sebagai CPNS baru dimulai akhir Mei 2022, waktu yang tampaknya cukup longgar, namun ternyata menimbulkan tantangan baru. Menjelang akhir pelatihan beasiswa AAS, Fedora menghubungi bagian SDM Lemhannas RI. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga telah diterima untuk melanjutkan S2 melalui AAS. Namun saat itu, aturan menyebutkan bahwa PNS baru bisa mendapat izin belajar setelah satu tahun pengangkatan, artinya sekitar dua tahun bekerja terlebih dahulu. Meski tidak ada kepastian, beberapa pihak internal, termasuk SDM, memberikan dukungan moral.

Fedora akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak AAS untuk menunda keberangkatannya selama satu tahun, dari seharusnya Juni 2022 menjadi Juni 2023. "Awalnya gak ada jawaban pasti dari Australia Awards juga," cerita Fedora. Ia mulai bekerja penuh sebagai CPNS di Lemhannas RI, sambil menyimpan harapan yang tak pasti untuk tetap bisa belajar ke Australia.

Namun semua berubah pada awal 2023, saat ia diangkat resmi sebagai PNS. Beberapa bulan setelah itu, datang kabar mengejutkan: ada permintaan dari KemenPANRB untuk melakukan rapat via Zoom. Pihak Lemhannas, termasuk direktur dan kasubdit, diminta untuk ikut serta dan mempertimbangkan izin belajar Fedora.

Dengan dukungan penuh dari direktur dan kasubdit di unit kerjanya, serta rekomendasi dari Lemhannas RI ke KemenPANRB, akhirnya Fedora mendapatkan izin untuk menempuh jenjang S2. Fedora pun langsung menghubungi pihak AAS. "Ketika ada kepastian dari menpan (KemenpanRB) itu aku langsung hubungi mereka, terus mereka langsung. 'Oh iya ini sudah ada offer letter-nya dari ANU (Australia National University)'. Jadi tiba-tiba mereka langsung banyak banget tuh informasi detail," ujarnya.

Fedora pun berangkat menempuh jenjang S2 di jurusan National Security Policy ke Australian National University dengan membawa semangat belajar dan kontribusi yang kelak akan kembali ia bawa pulang ke tanah air. Perjalanannya menunjukkan bahwa tak selamanya birokrasi menjadi penghalang. Dengan komunikasi terbuka, dukungan dari atasan, dan keteguhan hati, mimpi besar bisa tetap dijalankan. Anak

kedua dari dua bersaudara ini akhirnya lulus di bulan Desember 2024 dan kembali mengabdikan di Lemhannas RI pada bulan Januari 2025.

Walaupun belum dapat meraih mimpinya untuk menjadi seorang diplomat, Fedora merasa beruntung dan bersyukur menjadi seorang Analis Kebijakan di Kedepujian Pengkajian Strategik Lemhannas RI. "Menurut ku kayaknya belum berhenti disini kan journey-nya. Kita nggak tau kedepannya apakah ada jalan terbuka atau enggak tapi walaupun memang nanti nggak jadi diplomat nggak apa-apa, karena aku ternyata enjoy juga jadi analis kebijakan," jelasnya sembari tersenyum simpul.

Mengingat saat awal diterima di Lemhannas RI, Fedora menyebutkan bahwa dirinya mengira Lemhannas RI hanya terdiri dari satu unsur yaitu ASN. "Maksudnya nggak cuma PNS. Dulu aku nggak tau terus masuk (Lemhannas RI) ternyata ada TNI, POLRI, terus PNS," ungkapnya.

Saat mengikuti orientasi awal CPNS di Lemhannas RI, dirinya mengaku terkejut ketika harus mengikuti kegiatan orientasi yang melibatkan kegiatan fisik seperti lari dan baris-berbaris. "Yang paling kaget pas awal masuk, ada orientasi. Ternyata itu ada latihan - latihan baris - berbaris, terus ada jogging muterin monas tapi luar monas yang sampai gambar gitu," jelasnya sembari tertawa.

ASN yang meyakini pentingnya terus meningkatkan kapasitas diri ini berharap dalam konteks pengembangan organisasi dan institusi, Kedepujian Pengkajian bisa lebih inovatif dan kreatif agar dapat memperluas ruang untuk berinovasi dan mengembangkan potensi diri. "Harapannya sih sebenarnya lebih ke untuk teman-teman yang PNS - PNS junior ya, semoga kita dikasih ruang lebih untuk berinovasi dan lebih kreatif. Jadi kita bisa mengekspresikan kekreatifitasan kita," jelasnya.

Kekreatifitasan yang dimaksud Fedora adalah dalam hal menulis kajian dengan lebih percaya diri. Selain itu, pengembangan diri bagi personel pengkajian seperti seminar juga ia harapkan dapat diberikan.

Mengenai Lemhannas, di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini, harapannya adalah agar lembaga ini dapat terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman dengan lebih progresif. "Semoga lebih progresif ya, jadi kita nggak stuck disini, mengikuti perkembangan zaman ya, dan apalagi melihat kalau di pengkajian kan mungkin kita fokusnya di geopolitik," pungkasnya



Pidato Perdana Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB

Presiden Prabowo Subianto hadir dalam rangkaian acara Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Kehadirannya yang pertama setelah satu dekade terakhir menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, kerja sama internasional, serta pembangunan yang adil bagi semua negara. Sidang Majelis Umum ini dianggap sebagai kesempatan penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan perannya yang aktif di forum multilateral terbesar dunia. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang terus mendorong perubahan dalam sistem internasional.

Pada Senin, 22 September 2025, Presiden Prabowo berbicara dalam acara High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution bersama 55 negara dan organisasi internasional. Indonesia menegaskan sikap konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan dukungan luas komunitas internasional. Harapan besar terletak pada perkuatan posisi Palestina untuk memperoleh perdamaian yang adil, bermartabat, serta sesuai dengan hukum internasional.

Pada Selasa, 23 September 2025, Presiden Prabowo berkesempatan berbicara dalam sesi pertama Debat Umum pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Urutan ini menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Beliau menekankan pentingnya multilateralisme, solidaritas, serta langkah nyata menghadapi tantangan global, termasuk pangan dan perubahan iklim.

“Kita harus semakin mendekat, bukan menjauh. Bersama-sama kita harus berusaha mencapai harapan dan impian kita. PBB lahir dari abu Perang Dunia Kedua untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini,” tegas Presiden.

Presiden juga menyampaikan capaian sejarah baru Indonesia di bidang pangan. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai tingkat tertinggi, sehingga Indonesia tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengekspor beras, termasuk menyuplai untuk rakyat Palestina. Beliau menambahkan bahwa dampak nyata perubahan iklim terus dirasakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kenaikan permukaan laut di pantai utara Jakarta mencapai lima sentimeter per tahun, sehingga pembangunan tanggul laut raksasa menjadi keniscayaan untuk melindungi jutaan penduduk.

Indonesia, lanjut Presiden, menghadapi perubahan iklim dengan tindakan nyata. Komitmen terhadap Perjanjian Paris ditegaskan dengan target emisi nol bersih

tahun 2060 atau lebih cepat. Di hari yang sama, Presiden juga menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat. Pertemuan terbatas ini membahas rencana perdamaian untuk Gaza, termasuk rekonstruksi pasca-perdamaian. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian untuk stabilisasi di Gaza.

Momentum historis ini tidak boleh berlalu tanpa tindak lanjut. Lemhannas RI sebagai lembaga strategis bangsa segera merancang program penguatan kurikulum kepemimpinan yang menekankan wawasan geopolitik, diplomasi pertahanan, dan ketahanan multidimensi. Pidato Presiden dijadikan bahan ajar utama agar peserta didik memahami posisi Indonesia di panggung global sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya solidaritas lintas batas dan kepemimpinan moral.

Selain itu, Lemhannas memperluas riset strategis tentang pangan, energi, perubahan iklim, serta ancaman non-tradisional. Kajian ini diarahkan pada penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemerintah dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat peran Indonesia di fora internasional. Melalui pendidikan, kajian, dan jejaring internasional, Lemhannas memastikan pesan kenegarawanan Presiden di PBB menjelma menjadi strategi kebangsaan yang konkret, berjangka panjang, dan berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045.

Sumber. presidenri.go.id

UU Tapera Dibatalkan secara Keseluruhan

Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat secara keseluruhan setelah menyatakan pasal jantung di dalamnya bertentangan dengan konstitusi. UU tersebut tetap berlaku sampai selesai dilakukan penataan ulang paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan pada Senin (29/9/2025).

"Dengan mempertimbangkan cakupan peserta Tapera yang luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah menilai bahwa pembatalan seketika terhadap UU No 4/2016 tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan administratif dalam pengelolaan iuran ataupun aset peserta, termasuk potensi risiko hukum terhadap entitas pelaksana seperti BP Tapera dan lembaga keuangan terkait. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang sesuai dengan amanat UU No 1/2011, (UU Perumahan dan Kawasan Permukiman)," papar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan dalam sidang

terbuka di Jakarta (29/9/2025) dikutip dari kompas.id.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo ini, MK mengabulkan seluruh permohonan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka menguji Pasal 7 Ayat (1) yang mengatur: "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta." Permohonan itu merupakan salah satu dari tiga perkara serupa yang diajukan oleh 12 serikat pekerja.

Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Tapera bukan termasuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 ataupun dalam kategori "pungutan resmi lainnya". "Oleh karena itu, Mahkamah menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana didalilkan pemohon," kata Saldi Isra.

Menurut MK, Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara sebagai

penanggung jawab utama penyediaan rumah layak bagi warganya. Pasal tersebut mengubah peran negara dari "penjamin" menjadi "pemungut iuran" dari warganya. Terlebih Tapera akan menambah beban pekerja di tengah situasi ekonomi yang tidak kondusif saat ini.

Selain itu, MK menilai persoalan di dalam UU Tapera terletak pada desain hukum secara keseluruhan. Tapera dibentuk dengan konsep "tabungan", tetapi hasil akhirnya hanyalah pengembalian uang simpanan di akhir masa kepesertaan atau masa pensiun. Skema demikian secara inheren tidak mampu memenuhi tujuan utama, yaitu memberikan akses kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

"Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus menata ulang desain pemenuhan hak atas rumah dengan mengembangkan konsep perumahan yang salah satunya adalah central public housing agar dapat menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan perkotaan dan memberikan hunian bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai bagian dari sistem nasional penyediaan hunian publik yang masif, terjangkau dan berkelanjutan," jelas Enny.

Sumber: Kompas.id



Morchella Rinjaniensis

Morel Baru dari Rinjani



Foto: brin.go.id

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi (PRBE) berhasil mendeskripsikan sebuah spesies baru jamur morel yang ditemukan di kawasan Cagar Biosfer Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Spesies ini diberi nama *Morchella rinjaniensis* sesuai lokasi di mana jamur ini ditemukan.

Menurut penelitian, *Morchella rinjaniensis* memiliki kombinasi ciri yang unik, baik dari morfologi maupun genetik. Ada beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis *Morchella* lainnya, diantaranya jamur ini memiliki tubuh buah yang besar yang mencapai 19cm, memiliki pola lubang dan ridges yang tidak beraturan, memiliki spora yang berukuran besar dan permukaannya bergelombang menyerupai labirin.

Berdasarkan analisis genetika terhadap empat gen, spesies ini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibandingkan dengan jenis *Morchella* lainnya. Dalam pohon filogenetik, *M. rinjaniensis* ditempatkan dalam satu klade

dengan *Morchella galilaea*, tapi tetap ada perbedaan baik dari morfologi maupun genetik.

Jamur ini tumbuh liar di lereng Gunung Rinjani pada ketinggian sekitar 900–1.200 meter di atas permukaan laut. Lokasi spesifiknya meliputi jalur-jalur seperti Torean, Senaru, Sembalun, Tetebatu, dan Aik Berik. *Morchella rinjaniensis* biasanya muncul pada masa peralihan musim hujan ke musim kemarau, sekitar bulan April hingga Mei. Habitat tumbuhnya di bawah naungan vegetasi hutan alami, di dekat aliran air kecil atau di area semi terbuka. Juga ditemukan bersisian dengan tumbuhan dari keluarga Elaeocarpaceae, Urticaceae, dan Myrtaceae.

Morchella rinjaniensis memiliki potensi dan manfaat yang besar. Jamur ini bisa dimakan, sehingga memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif bernilai tinggi. Karena spesies baru, penelitian ini memperkaya data keanekaragaman, khususnya pada kelompok jamur tropis di Asia Tenggara/Indonesia. Ada potensi budidaya jamur ini kelak, dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berbasis konservasi, yang diharapkan bisa dimanfaatkan

oleh masyarakat sekitar. Penemuan ini juga relevan dengan program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO, yang mendorong pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan zona transisi biosfer.

Meski dapat dikonsumsi, sampai sekarang belum jelas apakah jamur morel dari Rinjani sudah berhasil dibudidayakan. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui cara menanamnya, jenis tanah yang cocok, dan bagaimana menjaga lingkungan agar sama dengan habitat aslinya. Pengelolaannya juga harus berbasis konservasi agar tidak mengancam populasi liar atau habitat alaminya akibat eksploitasi berlebihan.

Karena tumbuh di habitat yang spesifik dan sensitif (naungan hutan, lembap, dekat aliran air), perubahan iklim, degradasi habitat atau gangguan lingkungan bisa menjadi ancaman. Kesadaran masyarakat lokal dan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan.

Sumber: Berbagai Sumber

Tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan jenis ikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Spesies yang dinamakan *Barbodes klapanunggalensis* tersebut hidup di kedalaman gua tanpa cahaya, tidak memiliki mata, dan tubuhnya nyaris tanpa warna.

Ikan ini ditemukan di Gua Cisodong 1, bagian dari kawasan karst Klapanunggal, sebuah area berbatu kapur yang memiliki gua-gua alami dengan sistem air bawah tanah. Habitat seperti ini tergolong ekstrem dan sulit dijangkau. Para peneliti harus menelusuri lorong sempit dan menuruni kedalaman hingga lebih dari 50 meter untuk mencapai lokasi kolam tempat ikan ini hidup.

Barbodes klapanunggalensis dapat tumbuh mencapai 3 inci dan memiliki

tubuh bersisik. Karakteristik fisiknya adalah kepalanya memiliki moncong "bulat" dan bersungut seperti kumis di sekitar mulutnya.

Yang membuat ikan ini unik adalah kemampuannya bertahan hidup di lingkungan tanpa cahaya. Karena hidup di dalam kegelapan total, ikan ini mengalami adaptasi biologis ekstrem. Ia tidak memiliki mata karena organ tersebut tidak lagi dibutuhkan dalam kondisi gelap abadi. Selain itu, tubuhnya juga kehilangan pigmen warna, sehingga tampak keperakan atau transparan. Adaptasi seperti ini disebut troglomorfik, yaitu perubahan bentuk fisik makhluk hidup akibat tinggal di lingkungan gua.

Menurut para ilmuwan, *Barbodes klapanunggalensis* termasuk dalam kelompok ikan wader yang biasa ditemukan di sungai-sungai dangkal.

Namun, berbeda dengan kerabatnya yang hidup di air terbuka dan bercahaya, ikan gua ini telah berevolusi secara mandiri di dalam gua. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan evolusi dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan mereka.

Sayangnya, keunikan ikan ini juga membuatnya sangat rentan. Karena hanya ditemukan di satu tempat saja dan dalam jumlah yang terbatas, ikan ini berisiko tinggi punah jika habitatnya rusak. Ancaman terbesar berasal dari aktivitas penambangan batu kapur yang marak di wilayah karst Klapanunggal. Kegiatan ini bisa merusak ekosistem gua, mencemari air, dan menghancurkan rumah alami ikan tersebut.

Sumber: Berbagai Sumber

Spesies Baru Tanpa Mata "Barbodes klapanunggalensis"



Foto. Mongabay.co.id

Brigjen TNI Dwi Sasongko, Pati TNI AD Peraih KKP Terbaik Lemhannas RI: Mengangkat Isu Perubahan Iklim sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H. kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Asisten Latihan Kasad Bidang Kerjasama Militer tersebut berhasil meraih predikat Kertas Kerja Perorangan (KKP) Terbaik dalam Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 Lemhannas RI tahun 2025.

Perwira kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 30 November 1976 itu sejak awal memang dikenal sebagai sosok yang unggul. Ia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) tahun 1998 dan peraih penghargaan bergengsi Adhi Makayasa. Konsistensi prestasi itu terus berlanjut dalam kiprahnya di TNI, hingga kini ia dipercaya mengemban jabatan strategis di Mabesad.

Dalam P3N Lemhannas RI, Brigjen Dwi memilih judul KKP yang visioner: Penguatan Kemitraan Pentahelix Menghadapi Perubahan Iklim Guna Ketahanan Lingkungan dalam Rangka Ketahanan Nasional. Menurutnya, pilihan tema ini lahir dari kepekaan terhadap tantangan global. “Perubahan iklim adalah ancaman nonmiliter yang nyata. Jika tidak ditangani secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media, dampaknya bisa sangat serius terhadap ketahanan nasional,” ujarnya.

Meski harus membagi waktu antara padatnya program pendidikan Lemhannas RI dan tugas kedinasan, Dwi mampu menyelesaikan karya ilmiahnya dengan analisis yang tajam. Ia mengakui bahwa keterbatasan waktu menjadi tantangan terbesar, namun berhasil diatasi dengan

memperkuat analisis SWOT, melakukan cross-check dengan data literatur, serta memanfaatkan diskusi bersama peserta lain yang memiliki latar belakang di bidang lingkungan hidup. “Diskusi dengan rekan-rekan lintas latar belakang justru memperkaya perspektif dan memperkuat analisis,” jelasnya.

Salah satu nilai tambah dari KKP yang disusunnya adalah keberanian mengambil tema di luar latar belakang militernya. “Saya mengambil isu perubahan iklim yang tidak sesuai dengan background saya, namun justru membuka wawasan baru. Selain tantangan, isu ini juga membawa peluang besar, misalnya melalui carbon pricing yang dapat mendorong ekonomi hijau sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” katanya.

Rekomendasi yang lahir dari KKP ini antara lain mendorong delapan strategi implementatif yang ditujukan bagi kementerian dan lembaga terkait. Strategi tersebut menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta, LSM, dan terutama media massa. “Media perlu dilibatkan

agar isu perubahan iklim mendapat perhatian publik yang lebih besar. Dengan begitu, kesadaran kolektif akan terbentuk,” terang Dwi.

Prestasi Brigjen TNI Dwi Sasongko di Lemhannas RI ini menegaskan kembali kualitasnya sebagai seorang pemimpin yang komprehensif dan visioner. Dari peraih Adhi Makayasa hingga penyusun KKP terbaik, ia menunjukkan konsistensi integritas, kecerdasan, dan keberanian mengambil langkah di luar zona nyaman demi kontribusi yang lebih besar bagi bangsa.



● SUARA PESERTA

Irjen. Pol. Mukti Juharsa, S.I.K., M.H.

Mengabdikan untuk Bangsa, Meraih Prestasi Akademik Terbaik di Lemhannas RI

Irjen. Pol. Mukti Juharsa, S.I.K., M.H., kembali menorehkan prestasi gemilang. Perwira tinggi Polri kelahiran 12 November 1971 ini dinobatkan sebagai penerima penghargaan akademik terbaik dalam Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 Lemhannas RI. Penghargaan tersebut menambah panjang rekam jejak pengabdianya bagi bangsa dan negara, baik sebagai perwira reserse maupun sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat.

Sejak 12 Maret 2025, Mukti dipercaya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Sebelumnya, ia dikenal luas sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri. Lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1994 ini telah malang melintang dalam penanganan kasus-kasus besar, khususnya di bidang reserse dan pemberantasan narkotika. Karier panjangnya memperlihatkan konsistensi dedikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mukti menegaskan bahwa motivasi utamanya mengikuti P3N adalah kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. "Motivasi saya yang utama adalah untuk pembangunan bangsa. Kita harus bisa bangkit, membangkitkan semangat, dan memperjuangkan agar bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Dari sisi keamanan, khususnya Polri, kami berharap benar-benar menjadi institusi yang dicintai masyarakat, disayangi, serta hadir di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Menurut Mukti, keberhasilan akademik tidak datang begitu saja. Manajemen waktu, disiplin, dan keterbukaan dalam berdiskusi menjadi kunci utama. "Waktu ujian yang singkat membuat saya harus benar-benar mampu mengatur waktu dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar," ungkapnya. Diskusi bersama rekan-rekan, baik kelompok maupun perorangan, menjadi sarana penting untuk memperdalam pemahaman sekaligus menambah motivasi.

Program P3N Lemhannas RI memang dirancang untuk mencetak kader pimpinan nasional yang berkarakter negarawan, berpikir komprehensif, serta mampu menghadapi dinamika nasional maupun

global. Dengan latar belakangnya di kepolisian, Mukti mengaku tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan ritme akademik yang padat dalam waktu singkat. Namun, ia menyiasatinya dengan menambah literatur dari berbagai sumber serta berdiskusi intensif dengan sesama peserta. "Walaupun jadwal padat, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik," katanya.

Baginya, penghargaan ini bukan hanya kebanggaan pribadi, melainkan amanah untuk menjaga integritas dalam kedinasan. Mukti menegaskan, prestasi akademik harus diikuti dengan tanggung jawab moral dalam memimpin. Ia selalu mengingat pesan Gubernur Lemhannas RI: "Jangan sampai ada ikan busuk di kepala. Sekali jadi pemimpin, harus bersih dan clear terhadap hal itu." Pesan ini menjadi pegangan agar dalam setiap langkah, dirinya tetap menjaga integritas dan memberi teladan.

Selain itu, Mukti melihat bahwa keberhasilan akademik ini memiliki makna strategis bagi Polri. Ia menilai, ilmu yang diperoleh dari Lemhannas dapat diimplementasikan dalam memperkuat peran Polri, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa dalam menjaga ketahanan nasional. Menurutnya, Polri yang profesional dan dekat dengan masyarakat akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas negara.

Tidak lupa, Mukti juga memberikan pesan kepada peserta P3N angkatan berikutnya. Ia berharap,

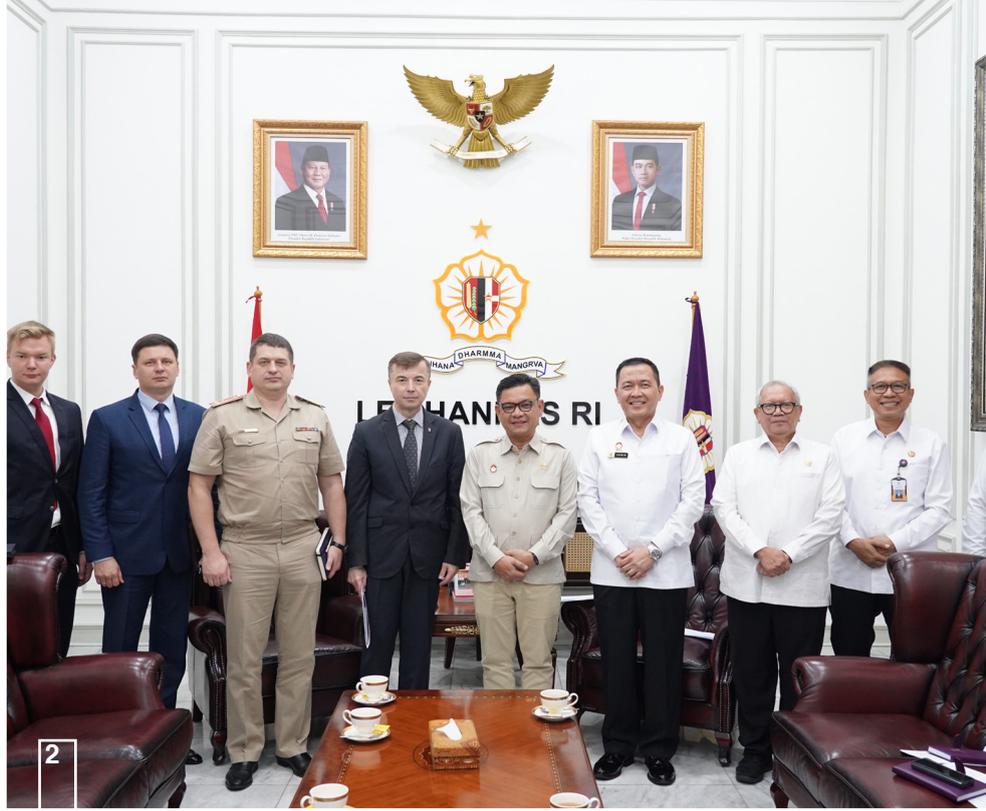
para peserta menjadikan Lemhannas sebagai kawah candradimuka untuk menempa ilmu dan karakter kepemimpinan. "Lembaga ini adalah tempat untuk belajar. Kita harus menambah ilmu, memperluas wawasan, dan menyiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan. Jadikan setiap proses pembelajaran sebagai bekal untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara," pesannya.

Dengan penghargaan ini, perjalanan Mukti Juharsa semakin menegaskan reputasinya sebagai perwira Polri yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga unggul dalam ranah akademik. Kombinasi antara pengalaman panjang di bidang reserse, kepemimpinan yang bersih, serta prestasi akademik yang diraih di Lemhannas RI, menjadi modal penting bagi dirinya untuk terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.





1



2

1 Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P. resmi dilantik sebagai Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI pada Jumat, (11/07)

2 Kunjungan Delegasi Defence Services Command and Staff College on International Collaborative Study Package Sri Lanka di Lemhannas RI pada Kamis, (31/07)

3 Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberi pembekalan kepada para peserta P3N 25 dan P4N 68 Lemhannas RI di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, (14/07)



3



4

4 Ceramah geopolitik Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si pada Retret Kadin 2025 di Lembah Tidar Magelang, Sabtu, (9/08)



5

5 Kuliah Umum Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing di Lemhannas RI pada Selasa (5/08)



6

6 Upacara peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. pada Minggu (17/08).

7 Audiensi Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Lemhannas RI pada Selasa (23/09)

8 Kunjungan Delegasi National Institute for Security Studies Nigeria pada Jumat (26/09)

9 Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. memperkuat pemahaman para peserta P3N 26 mengenai kebijakan publik di Indonesia pada Selasa (16/09)

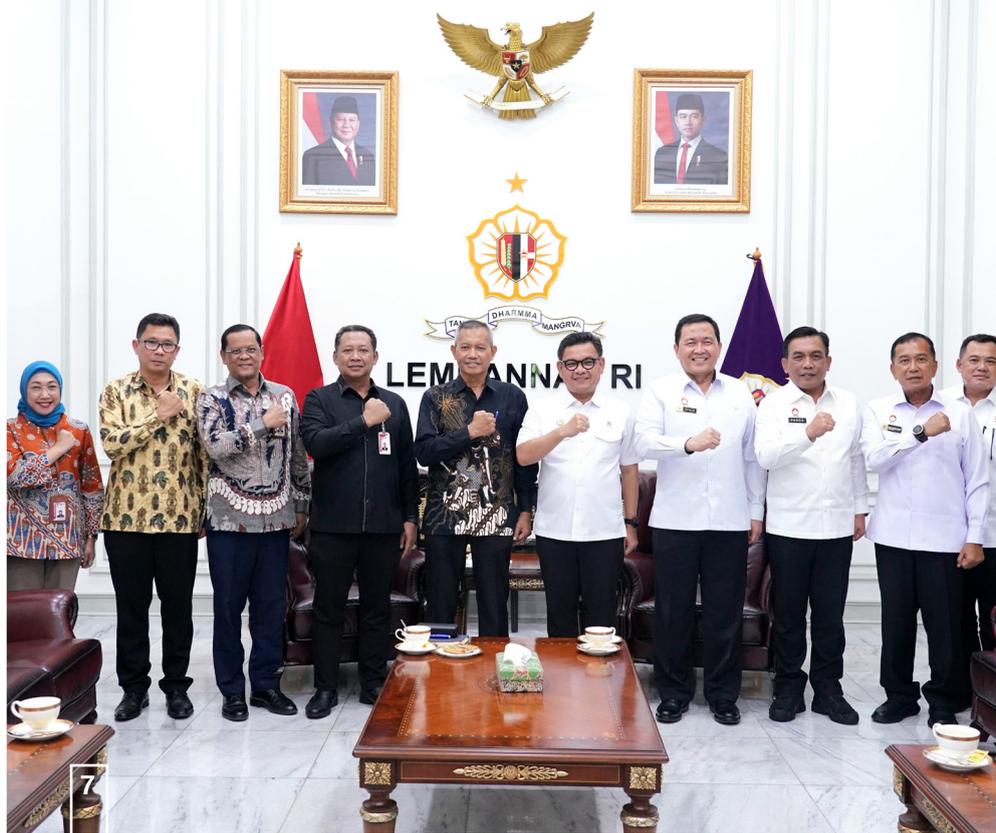




Foto. BPMI Setpres

8 AGENDA PRIORITAS RAPBN 2026



Perkuat Ketahanan Energi untuk Kedaulatan Bangsa

Tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.



Ketahanan Pangan sebagai Fondasi Kemandirian Bangsa

Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional

- Rp53,3 triliun untuk lumbung pangan dan cadangan pangan
- Rp46,9 triliun subsidi pupuk untuk 9,62 juta ton
- Rp22,7 triliun penguatan Bulog sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat



Bangun Generasi Unggul Melalui Makan Bergizi Gratis (MBG)

Alokasi anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.



Percepat Investasi dan Perdagangan Global

Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar USD 38 miliar akan dipercepat



Wujudkan Pendidikan Bermutu

Anggaran pendidikan 20% sekitar Rp757,8 triliun diantaranya:

- Beasiswa bagi siswa/mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta mahasiswa
- KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa
- Peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus sebesar Rp150,1 triliun
- Gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen sebesar Rp178,7 triliun
- Tunjangan profesi Guru Non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN Daerah disiapkan secara memadai
- Sekolah rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebagai jembatan pembangkit harapan
- LPDP ditargetkan memberikan beasiswa sebanyak 4 ribu mahasiswa



Kesehatan Berkualitas yang Adil dan Merata

Anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun:

- Meringankan beban masyarakat
- Merevitalisasi rumah sakit
- Mempercepat Penurunan Stunting
- Memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil
- Mengendalikan penyakit menular
- Menurunkan tuberkulosis
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Meningkatkan fasilitas kesehatan



Perekonomian Rakyat melalui Penguatan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih

80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk hingga layanan keuangan.

Ayo Sampaikan
**Aspirasi & Pengaduan
Pelayanan Publik**

Anda melalui:

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

Pilih Klasifikasi Laporan

PENGADUAN

ASPIRASI

LAIN INFORMASI

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang P

